2013 Small Micro Enterprise.pdf
Dec 17, 2020
22449 words / 139558 characters

Rima Elya Dasuki

2013 Small Micro Enterprise.pdf

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	id.scribd.com INTERNET	3%
2	es.scribd.com INTERNET	2%
3	repository.ipb.ac.id INTERNET	2%
4	www.scribd.com INTERNET	1%
5	infopapuabarat.blogspot.com INTERNET	1%
6	www.yumpu.com INTERNET	1%
7	pt.scribd.com INTERNET	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
9	christineflorencia.wordpress.com INTERNET	<1%
10	fr.scribd.com INTERNET	<1%
11	mpra.ub.uni-muenchen.de INTERNET	<1%
12	id.123dok.com INTERNET	<1%
13	anzdoc.com INTERNET	<1%
14	documents.mx INTERNET	<1%
15	docplayer.info INTERNET	<1%
16	www.bintunikab.go.id INTERNET	<1%
17	core.ac.uk INTERNET	<1%
18	zombiedoc.com INTERNET	<1%
19	www.slideshare.net INTERNET	<1%

20	media.neliti.com INTERNET	<1%
21	bintunicorruptionwatch.blogspot.com INTERNET	<1%
22	cimahikota.go.id INTERNET	<1%
23	www.smecda.com INTERNET	<1%
24	adoc.tips INTERNET	<1%
25	Universitas Lancang Kuning on 2018-10-18 SUBMITTED WORKS	<1%
26	iGroup on 2015-06-29 SUBMITTED WORKS	<1%
27	www.wondamakab.go.id INTERNET	<1%
28	abdulmajid12.blogspot.com INTERNET	<1%
29	wondamakab.go.id INTERNET	<1%
30	alindapepe.blogspot.com INTERNET	<1%
31	idoc.pub INTERNET	<1%
32	abdulgafur31.blogspot.com INTERNET	<1%
33	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id INTERNET	<1%
34	docobook.com INTERNET	<1%
35	dokumen.tips INTERNET	<1%
36	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
37	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id INTERNET	<1%
38	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
39	repository.iainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%
40	delialestari38.wordpress.com INTERNET	<1%
41	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
42	www.depkop.go.id INTERNET	<1%
43	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-03 SUBMITTED WORKS	<1%
44	iGroup on 2013-07-03 SUBMITTED WORKS	<1%
45	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-02 SUBMITTED WORKS	<1%
46	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-06 SUBMITTED WORKS	<1%

47	STIE Perbanas Surabaya on 2018-07-22 SUBMITTED WORKS	<1%
48	Universitas Negeri Jakarta on 2016-11-17 SUBMITTED WORKS	<1%
49	isi.ac.id INTERNET	<1%
50	www.lokersoloraya.com INTERNET	<1%
51	Surabaya University on 2012-07-01 SUBMITTED WORKS	<1%
52	Universitas Islam Indonesia on 2017-07-20 SUBMITTED WORKS	<1%
53	Universitas Terbuka on 2017-09-07 SUBMITTED WORKS	<1%
54	de.scribd.com INTERNET	<1%
55	freedownload7.files.wordpress.com INTERNET	<1%
56	id.wikipedia.org INTERNET	<1%
57	ojs.uho.ac.id INTERNET	<1%
58	www.birohumas.baliprov.go.id INTERNET	<1%
59	www.coursehero.com INTERNET	<1%
60	zakiyatur97.blogspot.com INTERNET	<1%
61	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-06 SUBMITTED WORKS	<1%
62	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-08-26 SUBMITTED WORKS	<1%
63	Udayana University on 2018-06-28 SUBMITTED WORKS	<1%
64	Universitas Diponegoro on 2020-04-26 SUBMITTED WORKS	<1%
65	Universitas Jember on 2015-10-13 SUBMITTED WORKS	<1%
66	Universitas Negeri Jakarta on 2018-01-13 SUBMITTED WORKS	<1%
67	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-19 SUBMITTED WORKS	<1%
68	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-11-12 SUBMITTED WORKS	<1%
69	ayiolim.wordpress.com INTERNET	<1%
70	eprints.uny.ac.id INTERNET	<1%
71	library.binus.ac.id INTERNET	<1%
72	lp4m.unair.ac.id INTERNET	<1%
73	ngakanyudha.wordpress.com INTERNET	<1%

74	www.bappenas.go.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- None

Excluded sources:

- perindagkop-bintunikab.org, internet, 10%
- dinsos.telukbintunikab.go.id, internet, 6%

“SOCIAL RISK AND IMPACT ASSESMENT”

Dandan Irawan
Rima Elya Dasuki
Shofwan Ashar Solihin

SMALL MICRO ENTERPRISE DEVELOPMENT FOR TANGGUH *FUTURE DEVELOPMENT PROJECT "SOCIAL RISK AND IMPACT ASSESMENT"*

Peneliti:

Dandan Irawan

Rima Elya Dasuki

Shofwan Azhar

Didokumentasikan Pada Perpustakaan Ikopin

sebagai Bacaan Mahasiswa Program S1 Dan S2

Kepala Perpustakaan Ikopin

Ida Ahadiah, S.Sos

NIK: 1531287

BP Tangguh Papua Barat

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ____ i
Daftar Isi ____ 1
Dftatar Tabel ____ 3
Daftar Gambar ____ 4

BAB I

1.2. Maksud dan Tujuan 8
1.3 Informasi Standar BP Indonesia Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Ekspansi The Tangguh LNG 9

BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN 11
2.1. Tahapan Kegiatan Tahapan kegiatan 11
2.1.1 Rapat Persiapan dan Koordinasi Kerja 11
2.1.2 Penyusunan Rancangan Kegiatan 11
2.1.3 Melakukan Identifikasi Potensi dan Masalah. 12
2.1.4 Pengumpulan Data Sekunder 12
2.1.5 Observasi dan Pengumpulan Data di Lapangan 12
2.1.6. Menyusun Hasil Kegiatan 12
2.1.7 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan 13

2.2 Metodologi Kajian 13

2.3 Pendekatan Penelitian 15
2.3.1 Pendekatan Pendataan 15
2.3.2 Pendekatan Analisis Data 15
2.2.3 Pendekatan Pengembangan Potensi Masyarakat 16
2.2.4 Pendekatan Partisipatif 16
2.2.5 Pendekatan Normatif 16

2.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data 16
2.3.1 Teknik Pengumpulan Data Sekunder 17
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data Primer 17
2.3.3 Observasi dan Pengumpulan Data di Lapangan 17
2.4 Pelaksanaan Kegiatan 18
2.5. Struktur Organisasi 20
2.6. Aktivitas Lapangan 20

BAB III
ANALISIS WILAYAH KAJIAN DAN INFORMASI DASAR _____ 24
3.1 Analisis Wilayah Kajian 24
3.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam Kabupaten Teluk Bintuni 24
3.1.2 Batas Wilayah Kajian 26
3.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah 26
3.1.5 Aspek Pendidikan 33

3.2. Informasi Dasar Pelaku Usaha 37
3.2.1 Aktivitas Usaha UMKM 37
3.2.2 Pemberdayaan Pelaku Usaha Oleh The Tangguh LNG 51
3.2.3 Permasalahan Pembangunan dan Sosio Ekonomi 52
3.2.4 Kebijakan *Stakeholders* Dalam Pembangunan dan Sosio Ekonomi 56

BAB IV
PENDEKATAN-PENDEKATAN PENGEMBANGAN
MICRO ENTERPRISE DAN VOCATIONAL
UNTUK OPERASI JANGKA PANJANG
THE TANGGUH LNG _____ 82

4.1 Analisis SWOT pengembangan UMKM untuk pendekatan “Close Camp” 82

4.2 Analisis SWOT Pengembangan UMKM Untuk Pendekatan “Open Camp” 87

4.3 Analisis SWOT Pengembangan UMKM Untuk Pendekatan “Modified” The Tangguh LNG Yang Dimodifikasi 90

4.4 Analisis Dampak Keberadaan The Tangguh LNG Di Masa Kini dan Di Masa Yang Akan Datang 94

4.5. Program Vokasi bagi UMKM 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tahapan Kegiatan	15
Tabel 2.2.	Rencana Perjalanan Tim ME & V	16
Tabel 3.1.	Penggunaan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009	22
Tabel 3.2.	Distribusi Penduduk Teluk Bintuni	24
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis	25
Tabel 3.4.	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006–2009 atas Dasar Harga Berlaku	27
Tabel 3.5.	Tingkat Pendidikan, Serapan Kerja dan Tingkat Pengangguran	31
Tabel 4.1.	Tabel Analisis Dampak dan Resiko Micro Enterprises & Vocational	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Metode dan Pendekatan Penelitian	9
Gambar 3.1.	Perkembangan Jumlah Sarana Sekolah Tahun 2006–2010	28
Gambar 3.2.	Jumlah Siswa Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2006–2010	29
Gambar 4.1	Hubungan input,proses,output dalam peningkatan kompetensi Bussines Development Service	56
Gambar 4.2.	Pola pengembangan kerjasama antar UMKM dalam sentra,antar sentra dengan usaha baru	57
Gambar 4.3.	Desain kreatis dan Inovanif Business Development Service	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Pemberdayaan ekonomi rakyat atau pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan model pembangunan ekonomi yang menekankan pada kekuatan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan merupakan upaya melibatkan rakyat dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas, daya beli, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dikelola oleh rakyat. Aktivitas usaha yang dilakukan UMKM pada dasarnya selalu didasarkan atas latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Hal ini pula yang menjadi perhatian penuh dari BP Indonesia, dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan program Community Development Proyek Tangguh. Penyelenggaraan proyek Tangguh oleh BP Indonesia di Teluk Bintuni memberikan ruang bagi komunitas Teluk Bintuni, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan suatu komitmen untuk menjadikan proyek pemberdayaan masyarakat tepat pada sasaran yang telah ditetapkan

Menurut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Teluk Bintuni, usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni belum dapat berjalan dengan baik, dimana usaha mikro kecil dan menengah yang ada antara lain usaha pertanian (sayur mayur) yang lebih dari 30 komoditi sayuran, hasil tangkapan nelyan berupa udang dan kepiting, penjualan pinang, usaha penjualan sayuran, usaha pembuatan tahu-tempe, usaha pembuatan kerupuk ikan/ udang/ kepiting, usaha pembuatan keripik, usaha pembuatan makanan

ringan/ kue-kue, usaha penjualan barang sembako, serta usaha jahit menjahit yang sebagian besar berada di distrik Bintuni dan di distrik Babo.

Peningkatan dan penyediaan infrastruktur sebagai jaringan pendukung usaha mikro masyarakat, pemberian dukungan pengembangan usaha mikro masyarakat tradisional dan pengrajin, pembentukan wadah-wadah usaha mikro, pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro terutama di wilayah DAV's, sangat diperlukan dalam pengembangan bidang koperasi dan UMKM.

Pengusaha binaan BP di Teluk Bintuni diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu *Local Firm* dibawah binaan BHBEP dan *Small Medium Enterprise*, yang dibina Livelihood Departement dan Bina Swadaya Konsultan. Local Firm terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu :

a. Local Firm berskala kecil dengan net equity <= Rp 5 M;
b. Local Firm berskala Menengah dengan net equity Rp 5-10 M dan
c. Local Firm berskala besar dengan net equity >= 10 M

Adapun kriteria pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lainnya dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang didasarkan atas UU No. 20/2008, menyebutkan bahwa :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Diketahui pula bahwa terdapat pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk bertransaksi dengan BP Indonesia, tetapi tidak melakukannya dengan berbagai alasan, misalnya persyaratan yg ditetapkan sangat ketat, sudah melakukan transaksi dengan perusahaan lain di sekitar kawasan Teluk Bintuni, perusahaan belum memiliki aspek legal yang lengkap untuk bertransaksi dengan BP Indonesia dan sebagainya. Pelaku usaha tersebut ialah perusahaan daerah (Perusda) dan pengusaha lokal yang tergabung dalam asosiasi bisnis (Gapensi).

Dari kajian awal, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM di Teluk Bintuni, antara lain :

a. Belum optimalnya pelayanan perijinan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah
b. Lemahnya kelembagaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah
c. Lemahnya daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat
d. Kurangnya investasi berskala sedang dan besar
e. Terbatasnya pembinaan dan penyuluhan
f. Terbatasnya pelatihan dan pendampingan terhadap usaha-usaha perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah
g. Rendahnya alokasi bantuan modal untuk keberdayaan masyarakat
h. Belum berkembangnya usaha-usaha industri mikro kecil dan menengah
i. Kurangnya sarana dan prasarana

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 13/119

Pada saat ini The Tangguh LNG sedang merencanakan pengembangan kilang baru yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada keberadaan para pengusaha, baik local firm maupun pelaku usaha UMKM. Dari gambaran di atas, BP Indonesia dan Pusat inkubator Bisnis Ikopin (Pibi Ikopin) melaksanakan kegiatan **Studi Pengembangan Micro Enterprises and Vocational Pada The Tangguh LNG Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang**, yang merupakan studi tentang bagaimana pembinaan terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM baik yang pemula maupun yang sudah eksis dalam kaitannya dengan kondisi Tangguh LNG di masa kini dan di masa yang akan datang sehingga dapat diperoleh suatu hasil untuk menyusun suatu kebijakan yang komprehensif.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan **Studi Pengembangan Micro Enterprises and Vocational Pada The Tangguh LNG Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang**, ialah Mengkaji dampak dan risiko kegiatan Tangguh LNG terhadap pengembangan UMKM yang tepat di wilayah The Tangguh LNG di Teluk Bintuni Papua Barat.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengkaji kebijakan dan program UMKM saat ini dan masa yang akan datang
2. Mengkaji risiko potensial yang mungkin muncul bagi masyarakat, pemerintah dan/BP
3. Mengkaji bisnis lokal yang potensial untuk dikaitkan dengan pengembangan proyek tangguh
4. Mengkaji lokasi bisnis pengembangan pasar, kapasitas dan sumber daya bisnis yang potensial untuk dikembangkan
5. Merekomendasikan strategi, program dan pendekatan pengembangan bisnis bagi masyarakat dan stakeholder lainnya di masa yang akan dating

1.3 Informasi Standar BP Indonesia Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Ekspansi The Tangguh LNG

Berdasarkan master plan BP Indonesia akan mengembangkan kegiatan The Tangguh LNG antara lain eksplorasi minyak dan gas, transmisi gas, kilang LNG, fasilitas kepelabuhan dan Lapangan terbang. Adapun perluasan tersebut meliputi:

a. Pembangunan dan pengoperasian Kilang LNG 3
b. Pembangunan dua anjungan lepas pantai dan jaringan perpipaan bawah laut.
c. Pembangunan tujuh sumur produksi gas.
d. Pembangunan empat sumur eksplorasi
e. Pembangunann empat sumur *infill* dan fasilitas pendukungnya.
f. Pengembangan Pasokan Gas Tahap Selanjutnya (pasokan gas untuk Kilang LNG 3 dan pembangunan Kilang LNG 4).
g. Pembangunan Kilang LNG 4 dan tambahan sampai dengan Sembilan (9) anjungan lepas pantai dan fasilitas pendukungnya.
h. Fasilitas pendukung yang akan ditambahkan dalam wilayah dan pagar Tangguh LNG adalah dermaga BOF (Bulk Off Load Facility), Dermaga LNG Konsentrat, tanki LNG dan tanki Kondensat.
i. Standarisi fasilitas dan tehnologi yang ada
j. Melaksanakan dan mengembangkan AMDAL The Tangguh LNG
k. Fasilitas pendukung termasuk lapangan terbang, dengan alternatif lokasi di Babo,di dalam wilayah Tangguh LNG atau di Saengga Savana
l. Pengadaan barang dan jasa dimana untuk tahap operasi jangka panjang nilai kontrak untuk pengadaan barang berkisar di USD 130-150 juta per tahun

Pembangunan Train 3 telah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Pertambangan,dimana pembangunannya akan dimulai pada tahun 2013 dan diharapkan selesai pembangunnya pada 2018 serta akan mulai berproduksi tahun 2019 .Sementara Program pemberian listrik bagi Bintuni

akan dimulai pada tahun 2013 yang akan didistribusikan oeh PLN. Pengembangan ini juga merujuk kepada Petrochemical Joint Study, Kepmen Perindustrian no. 590/M- IND/Kep/11/2012 tentang “Tim Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Papua Barat”. Kegiatan pengembangan ini akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan UMKM

BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Tahapan Kegiatan Tahapan kegiatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka disusun lingkup kegiatan **Studi Pengembangan Micro Enterprises and Vocational Pada The Tangguh LNG Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang** ialah sebagai berikut :

a. Mengadakan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka mencari masukan;
b. Penyusunan rancangan kegiatan;
c. Melakukan identifikasi potensi dan masalah;
d. Pengumpulan data sekunder;
e. Observasi dan pengumpulan data di lapangan;
f. Analisa hasil observasi dan pengolahan data;
g. Menyusun hasil pelaksanaan kegiatan;
h. Penyusunan laporan hasil kegiatan;

2.1.1 Rapat Persiapan dan Koordinasi Kerja

Aktivitas yang dilaksanakan ialah melakukan rapat tim kerja keseluruhan, rapat kerja internal dan koordinasi dengan instansi terkait, untuk menghimpun dan menetapkan materi bahasan dalam penyusunan Studi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Pengembangan The Tangguh LNG di Masa Yang Akan Datang.

2.1.2 Penyusunan Rancangan Kegiatan

Aktivitas yang dilaksanakan ialah melakukan rancangan kegiatan secara keseluruhan guna memudahkan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan

2.1.3 Melakukan Identifikasi Potensi dan Masalah.

Aktivitas yang dilakukan ialah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menyelaraskan antara rencana kegiatan dengan penetapan tujuan yang ditetapkan.

2.1.4 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder meliputi :

a. Semua kebijakan dan program yang relevan
b. Menggali kemungkinan resiko yang timbul dari kebijakan dan program yang telah disusun
c. Potensi bisnis yang mungkin dapat dikembangkan
d. Analisis lokasi, pengembangan pasar, kapasiatas dan sumber-sumber daya lainnya yang dapat dikembangkan.
e. Pengalaman praktis dari lembaga lain yang pernah melakukan aktivitas community development.

2.1.5 Observasi dan Pengumpulan Data di Lapangan

Aktivitas yang dilaksanakan ialah melakukan survey lapangan, guna memperoleh data primer yang diperlukan, meliputi :

a. Data kependudukan, pendidikan dan perekonomian
b. Kebijakan instansi terkait dalam pengembangan UMKM
c. Kondisi eksisting transaksi antara anggota masyarakat/ anggota koperasi, koperasi dan pihak ke tiga.
d. Potensi usaha yang dapat dikembangkan
e. Bentuk pembinaan UMKM yang relevan dengan kondisi setempat

2.1.6. Menyusun Hasil Kegiatan

Data yang terkumpul selanjutnya ialah dilakukan analisis dan kompilasi data yang didasarkan atas hasil diskusi kelompok terarah dan hasil pengamatan di lapangan. Selanjutnya dilakukan penelahaan terhadap berbagai data dan informasi terkait. Aktivitas yang dilaksanakan ialah

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

menyusun draft laporan akhir yang merupakan bentuk pengembangan UMKM yang tepat, kemudian didiskusikan dalam presentasi laporan akhir.

2.1.7 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Aktivitas yang dilaksanakan ialah menyusun laporan akhir yang lengkap setelah memperoleh masukan dari pelaksanaan presentasi laporan akhir.

2.2 Metodologi Kajian

Secara umum metodologi pelaksanaan pekerjaan lebih dititikberatkan pada proses dan tahapan kerja yang berkesinambungan yang mana garis besar pelaksanaan pekerjaan akan dibagi kedalam beberapa kegiatan pekerjaan yang dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

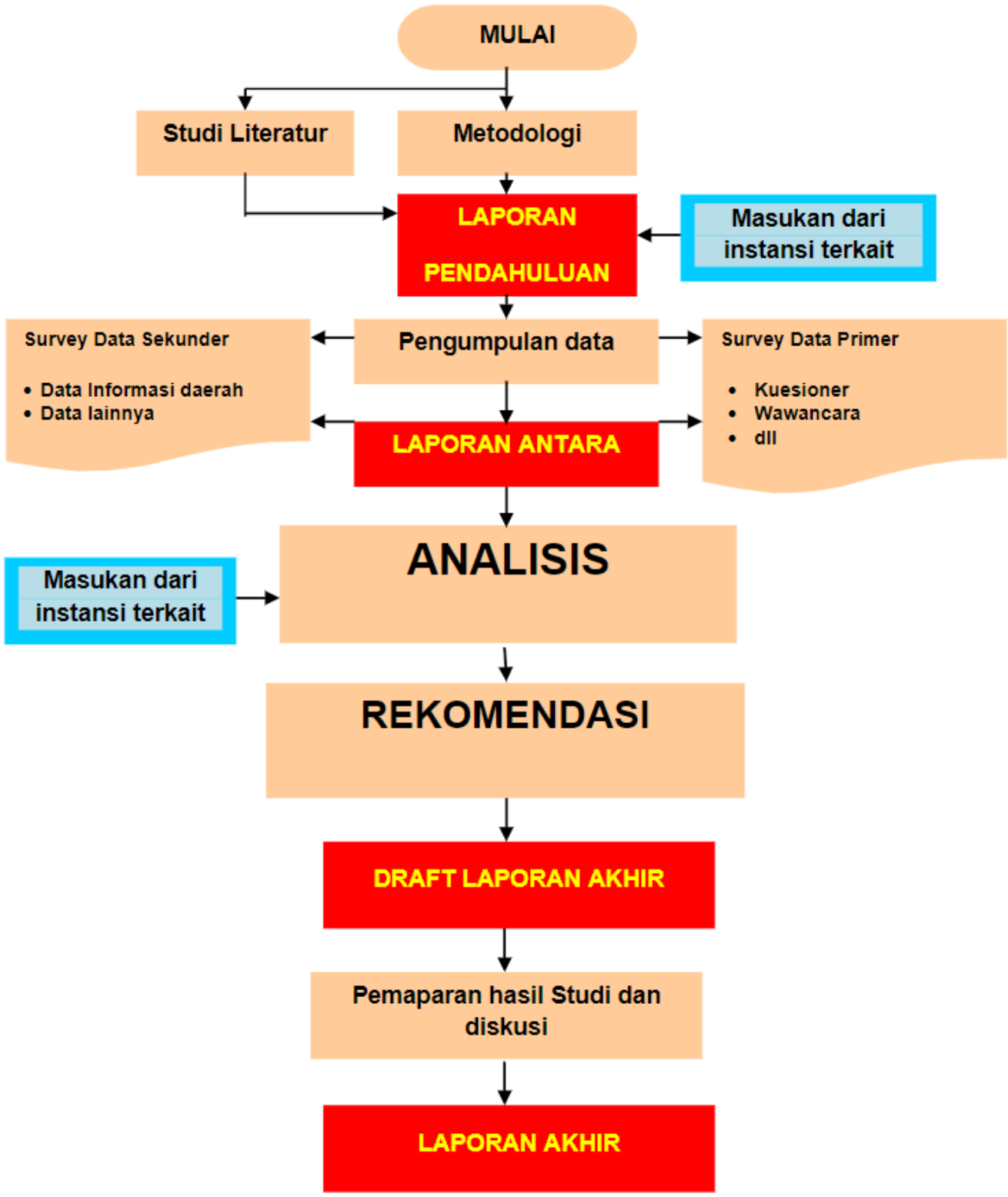

Gambar 1.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

2.3 Pendekatan Penelitian

2.3.1 Pendekatan Pendataan

1) Penyiapan daftar (Checklist) Data yang akan dikumpulkan.
2) Penyiapan peralatan penunjang proses pengumpulan data.
3) Kemampuan dan kesiapan tenaga pelaksana yang akan melakukan pengumpulan data.
4) Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data.
5) Penyiapan metode pengolahan data, baik metode yang bersifat teoritis maupun teknis praktis.
6) Penyiapan tenaga atau personil yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data, mulai dari langkah yang paling sederhana sampai yang rumit dengan dukungan peralatan tertentu.
7) Merumuskan hasil pengolahan data dalam bentuk atau rumusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis atau langkah-langkah selanjutnya.

2.3.2 Pendekatan Analisis Data

Beberapa langkah penting yang akan dilakukan dalam Analisis Data ini adalah :

1) Memahami dengan tepat maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan.
2) Memahami dengan jelas kondisi, karakteristik kawasan, khususnya kawasan studi.
3) Dimilikinya acuan, pedoman atau aturan yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan model pengembangan dan konsep penanganan.
4) Dimilikinya literatur dan bahan-bahan yang mencukupi.
5) Dilakukannya diskusi dan pertemuan-pertemuan dengan semua *stakeholders* di yang terkait, dalam rangka memperoleh masukan.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

6) Dilakukannya diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua tim pelaksana dan dengan pengguna jasa dalam proses penyusunan model pengembangan dan konsep rekomendasi.

2.2.3 Pendekatan Pengembangan Potensi Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode **Survey Swadaya** dimana masyarakat melalui perwakilannya (tokoh/ pemuka masyarakat dan kalangan terpelajar) secara aktif melakukan penggalian potensi kawasannya melalui serangkaian kegiatan penyebaran angket/ quisioner terbimbing serta wawancara.

2.2.4 Pendekatan Partisipatif

Pendekatan participatory digunakan untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai *stakeholders* dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kepentingan berbagai pihak/stakeholders.

2.2.5 Pendekatan Normatif

Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisa, penyusunan rencana, perumusan strategi dan rencana aksi program maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.

2.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun dan mengkompilasi berbagai sumber dokumentasi berkaitan dengan masalah kajian.Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan mengambil data langsung ke lapangan.

2.3.1 Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Tahapan pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data berupa:

1) ***Review* terhadap kebijakan stakeholder** *Review* dilakukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM
2) **Tinjauan literatur**,mencakup tinjauan terhadap teori-teori yang terkait dengan pendekatan UMKM
3) **Penyusunan basis data**, mencakup pengumpulan (*collecting*) dan kompilasi data yang meliputi :
    a. Semua kebijakan dan program yang relevan
    b. Menggali kemungkinan resiko yang timbul dari kebijakan dan program yang telah disusun
    c. Potensi bisnis yang mungkin dapat dikembangkan
    d. Analisis lokasi, pengembangan pasar, kapasitas dan sumber-sumber daya lainnya yang dapat dikembangkan.
    e. Pengalaman praktis dari lembaga lain yang pernah melakukan aktivitas community development

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, maka metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara (terstruktur dan mendalam), observasi, dan identifikasi *stakeholders*. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara adalah untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

2.3.3 Observasi dan Pengumpulan Data di Lapangan

Aktivitas yang dilaksanakan ialah melakukan survey lapangan, guna memperoleh data primer yang diperlukan, meliputi :

1) Data Terkini kependudukan, pendidikan dan perekonomian
2) Data khusus tentang perkembangan UMKM dan koperasi

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

3) Kebijakan stakeholders dalam pengembangan UMKM dan Wirausaha asal Penduduk Asli
4) Kondisi existing tentang kerjasama kemitraan usaha antara penduduk asli dengan BP
5) Kendala yang dihadapi dalam kerjasama kemitraan usaha antara penduduk asli dengan BP
6) Identifikasi kebutuhan layanan dari BP
7) Standard persyaratan yang harus dipenuhi UMKM untuk dapat mengikuti tender/kerjasama dengan BP
8) Karakteristik dan data pengusaha/ wirausaha yang tercatat di BHBEP
9) Hubungan antar stakeholders
10) Karakterisitik dan data pengusaha/ wirausaha yang memiliki potensi untuk bermitra dengan BP
11) Karakteristik dan data pengusaha/ wirausaha (Penduduk Asli) yang melakukan aktivitas di Stocking Point
12) Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha masyarakat, ditinjau dari aspek sosial, aspek HAM, aspek keamanan dan aspek gender
13) Pelaksanaan program
14) Hambatan dan konflik pelaksanaan program
15) Ekspektasi yang diharapkan pengusaha/ wirausaha dalam pemenuhan permintaan BP sekarang dan nanti
16) Jenis vokasi yang sudah diberikan
17) Dampak/Manfaat vokasi yang telah dilaksanakan
18) Bentuk vokasi yang diinginkan dalam peningkatan kapasitas masyarakat

2.4 Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pekerjaan secara umum yang secara garis besar dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Tabel 2.1. Tahapan Kegiatan

AKTIVITAS	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL
TAHAP 1: Risk and Social Issues AsseUMKMnt: Identification,Classification and Technical Recommendation							
Pra-kontrak dan penjelasan penugasan							
Studi Pustaka dan Pengumpulan Data							
Laporan Antara							
TAHAP 2:Strategy and Policy Development, Including Technical Program Development							
Pengambilan data lapangan							
Analisis data dan Penulisan laporan							
Lokakarya							
Laporan Akhir							

2.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kjian ini terdiri atas,

Ketua : Dandan Irawan, SE, MSc

Anggota : Rima Elya Dasuki, SE, MSc

Shofwan Azhar Solihin, SE, MSc

Agus Nugraha, ST

2.6. Aktivitas Lapangan

Aktivitas lapangan yang akan dilaksanakan meliputi :

NO.	LOKASI	NARA SUMBER
1.	Distrik Bintuni	1. Gapensi (Marius Horna) 2. Ketua LMA (Abraham Wekaburi) 3. BHBEP (Wayan)
2.	Distrik Bintuni	1. Sekretaris Gapensi (Nita) 2. Disperindagkop/ Ka. Bid Perdagangan (Ahmad Bauw) 3. Dinas Pertanian (Romayumi) 4. Livelihood Dept (P Ahmad Lee)
3.	Distrik Baboo	1. Ketua LMA Baboo 2. Bendahara Kop Matambay Siri (Jafar) 3. Bina Swadaya (Sisca) 4. Ketua Koperasi (Ningsih Fimbay) 5. Pertemuan dengan P Franky dan dr. Pascalis 6. Pendamping Koperasi (Nurlaila Muhammad)
4.	Saengga	1. Kepala kampung Saengga 2. Tokoh Pemuda 3. Aparat Pengembangan Kampung 4. Ketua koperasi Unoperta
5.	Tanah Merah	1. Ketua Kelompok Tani (Gerardus Sabandata) 2. Petani (Ibrahim)

6.	Kampung Tofoi	1. Sekretaris Koperasi Imuri tofoi 2. Tokoh Mayarakat
7.	Tofoi	1. Petani orang papua asal non suku sumuri. 2. Petani orang papua asal suku sumuri 3. Ibu kepala kampung tofoi (ketua koperasi Imuri 4. Anggota koperasi petani pemuda 5. Pengurus koperasi Pemuda 6. Sekretaris /Bendahara koperasi Imuri
8.	Distrik Weriagar	1. Ka. Sie Umum Distrik Weriagar (Agustinus) 2. Pengurus KUB Weriagar (Lukman Muchtar) 3. Nelayan PAP
9.	Kampung Tofoi	1. Masyarakat Umum
10.	Distrik Bintuni	1. Kepala Kampung Weriagar (Banyamin Hafrabun) 2. Ketua Koperasi Bintuni Mandiri (Kris Mailoa) 3. Bag Ekonomi Bappeda Teluk Bintuni (Godliff) 4. Perusahaan Daerah Bintuni Utama Mandiri (Hendro)

11.	Timika	1. Lorenz Moka (DIrektur Inkubator LSD PT Freeport) 2. Eksa Santika (Strukural Inkubator PT Freeport) 3. Nugi Herwindo (Pengusaha yang telah bermitra dengan Purchasing Dept. PT FI) 4. Atep (Pengusaha beras terbesar di Timika dan tidak bermitra dengan Purchasing Dept. PY FI)

BAB III
ANALISIS WILAYAH KAJIAN DAN INFORMASI DASAR

3.1 Analisis Wilayah Kajian

3.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam Kabupaten Teluk Bintuni

Kawasan Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten pemekaran baru di Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) dengan pengesahan UU RI No. 26/2002. Kabupaten ini terletak antara pantai selatan kepala burung dan pantai semenanjung Onin, menghadap ke arah laut Seram di lepas pantai barat Papua. Berdekatan dengan leher pegunungan sempit yang menghubungkan kepala burung dengan wilayah lainnya di Provinsi Papua.

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Teluk Bintuni berada antara 1°57'50"LS - 3°11'26"LS dan 1.9.32°44'59" - 134°14'49"BT. Wilayah ini berbatasan dengan :

- wilayah administrasi Distrik Kebar dan Testega, Kabupaten Manokwari di sebelah utara
- wilayah Distrik Kokoda dan Aifat Timur, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah barat
- wilayah Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak di sebelah selatan dan
- wilayah Distrik Windesi dan Wasior, Kabupaten Manokwari di sebelah timur

Menurut data Disperindagkop & UKM Teluk Bintuni tahun 2011, luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah 1,862,200 ha, terdiri dari 10 Distrik/Kecamatan dan sejak pertengahan tahun 2008 telah dimekarkan menjadi terbagi atas 24 Distrik /Kecamatan dengan 115 Kampung dan 2 Kelurahan. Distrik dengan wilayah paling luas adalah Babo (3,472 ha), dan yang paling sempit adalah Distrik Idoor (198 ha). Bila dibandingkan dengan luas seluruh provinsi yang berada di kepala burung, maka luas Kabupaten Teluk Bintuni menempati 17,8 % dari wilayah ini atau seluas 1.866.344 ha dari 10.491.892 ha. (Sumber : BP Tangguh , ISP, output 3 of 4, 10.02.2006, p. 53)

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Teluk Bintuni terbagi menjadi :

1. Kawasan pesisir yang berada di sekitar teluk yang dicirikan dengan adanya pantai, dan muara, dan delta yang ditumbuhi oleh hutan pantai, hutan mangrove, nipah dan hutan sagu/campuran, Wilayah ini didiami oleh penduduk di Distrik Aranday, dan Distrik Babo.
2. Kawasan dataran rendah yang dicirikan oleh hutan dataran rendah, sungai - sungai, dan delta. Wilayah ini didiami oleh sebagian penduduk di Distrik Bintuni.
3. Kawasan dataran tinggi yang dicirikan oleh hutan, sungai, dan danau.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dapat dicirikan menjadi :

1. Kawasan yang memiliki akses jalur laut dan sungai , seperti Babo distrik Babo dan Kota Bintuni Distrik Bintuni menuju Kabupaten/kota Sorong, dll.
2. Kawasan yang memiliki akses jalur darat, seperti kota Bintuni di distrik Bintuni menuju kabupaten/kota Manokwari
3. Kawasan yang memiliki akses jalur udara, seperti Babo di Distrik Babo dan Kota Bintuni di Distrik Bintuni menuju kota-kota Sorong, dan Manokwari. Jalur ini yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan kota/kampung di Teluk Bintuni dengan kota-kota /daerah lain di Provinsi Papua, dll.

Secara keseluruhan kawasan Teluk Bintuni berada pada ketinggian 0-2000 meter dpl. Sepertiga wilayahnya dalah daerah rawa-rawa yang di tumbuhi hutan sagu dan bakau . Sepertiga Wilayahnya juga di tutupi oleh hutan rimba dan sisanya merupakan lereng terjal. Kemiringan lahan di kawasan ini bervariasi mulai kemiringan 0-2 persen hingga 14-40 persen. Iklim di wilayah Teluk Bintuni Merupakan iklim tropis Monsoon yang dicirikan oleh kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi sepanjang tahun atau tropik basah dan memiliki suhu udara berkisar 20° - 38°C.

3.1.2 Batas Wilayah Kajian

Wilayah yang menjadi fokus kajian ialah Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan Kabupaten lokasi di mana The Tangguh LNG berada. Dalam kajian awal menunjukan bahwa keberadaan The Tangguh LNG memberikan pengaruh yang sgnifikan terhadap perkembangan sosio ekonomi di kawasan Teluk Bintuni. Batas wilayah kajian ini mencakup ke 24 distrik yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, meskipun tetap didominasi di kawasan Distrik Bintuni.

Untuk kawasan Teluk Bintuni akan difokuskan di Distrik Bintuni dengan pengayaan informasi dari beberapa daerah yang memiliki lokasi stocking point. Adapun di kawasan Fak Fak akan dilakukan wawancara secara mendalam kepada pemangku kepentingan yang layak untuk dijadkan sebagai responden.

Perluasan The Tangguh LNG di masa mendatang akan tetap memberikan pengaruh yang signifikan di Kabupaten Teluk Bintuni dan diprediksi akan merambah ke wilayah Kabupaten Fak Fak, sehingga untuk kajian ini, Tim Micro Enterprises dan Vocational juga akan mendalami data dan informasi di wilayah Kabupaten Fak Fak.

3.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data rancangan RTRW Kabupaten Teluk Bintuni, sebagian besar lahan di Kabupaten Teluk Bintuni masih berupa kawasan hutan dengan luas 18.244 km² atau sekitar 97,8 persen dari luas wilayah perencanaan. Kawasan hutan ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan perlindungan dan pelestarian, maupun areal penggunaan lainnya. Penggunaan lahan fisik, seperti permukiman dan sarana prasarana, hanya sedikit sekali proporsinya terhadap luas total keseluruhan, yaitu 393 km² atau berkisar 2,2 persen. Penggunaan lahan untuk keperluan permukiman dan sarana prasaran yang paling banyak terdapat di Distrik Bintuni.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

TATA GUNA LAHAN	LUAS (Ha)	%
Sawah	150	0,01
Ladang Tegal	189.350	10,1
Pekarangan	9.150	0,49
Padang	4.973	0,27
Rumput	8.470	0,45
Perkebunan	10.500	0,56
Rawa-Rawa	7.250	0,39
Kawasan Hutan Negara	1.629.412	87,50
Lain-Lain	945	0,16
Jumlah	**1.862.200**	**100,00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, 2009

Secara umum Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai daya dukung untuk pengembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan 13 industri, kawasan permukiman, dan kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Teluk bintuni dibagi atas kawasan hutan produksi terbatas (29,14 persen) dan hutan produksi konversi (26,55 persen). Hutan produksi terbatas berdasarkan peruntukannya di sepanjang pesisir Distrik Babo, di pedalaman Distrik Aranday, serta sedikit di perbatasan antara Distrik Bintuni dan Distrik Ransiki (Kabupaten Manokwari). Sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi berada hampir di setiap distrik di Kawasan Teluk Bintuni mengitari teluk mulai dari Distrik Kokas (Kabupaten Fak-fak) hingga Distrik Aranday.

3.1.4 Kependudukan dan Struktur Ekonomi

Data jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga hanya bisa didapat dari Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS), dimana Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran nol, sedangkan SUPAS dilaksanakan pada tahun yang berakhiran lima. Dengan demikian, untuk tahun-tahun yang berakhiran selain nol dan lima, jumlah penduduk diperoleh dari hasil proyeksi dan pendekatan hasil-hasil survei terkait. Berdasarkan proyeksi tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2008 diperkirakan mencapai 55.049 jiwa yang terdiri dari 31.281 laki-laki dan 23.768 perempuan. Jumlah ini meningkat sebesar 2,58 persen dari tahun sebelumnya (53.665 Jiwa), peningkatan atau pertumbuhan penduduk ini merupakan pertumbuhan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Papua Barat (IPB, 2011)

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dan terus bertambah setiap tahun belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Sebagian besar penduduk Kabupaten Teluk Bintuni masih terpusat di Distrik Bintuni sekitar 30,82 persen. Hal ini dikarenakan Distrik Bintuni merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Banyaknya rumah tangga pada tahun 2008 tercatat sebesar 13.551 rumah tangga dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga 4,06. Jumlah ini mengalami peningkatan 5,41 persen dari tahun sebelumnya (12.855 rumah tangga). (BPS, Teluk Bintuni dalam Angka, 2008). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Teluk Bintuni

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk
	[1]	[2]	[3]
1	Farfurwar	1,016	1.94
2	Babo	3,234	6.17
3	Sumuri	6,571	12.54
4	Aroba	2,601	4.96
5	Kaitaro	756	1.44
6	Kuri	906	1.73
7	Wamesa	1,151	2.2
8	Bintuni	18,552	35.4
9	Manimeri	5,313	10.14
10	Tuhiba	613	1.17
11	Dataran Beimes	347	0.66
12	Tembuni	874	1.67
13	Aranday	1,055	2.01
14	Kaomundan	659	1.26
15	Tomu	2,446	4.67
16	Weriagar	1,283	2.45
17	Moskona Selatan	509	0.97
18	Meyado	1,068	2.04
19	Moskona Barat	359	0.69
20	Merdey	482	0.92
21	Biscoop	479	0.91
22	Masyeta	364	0.69
23	Moskona Utara	733	1.4
24	Moskona Timur	1,032	1.97
Teluk Bintuni		**52,403**	**100**

Sumber : BPS Teluk Bintuni 2008

Adapun komposisi penduduk dilihat dari klasifikasi jenis kelamin dapat dilihat dalam table sebagai berikut,

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis

No.	Kecamatan	Laki – Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
	[1]	(2)	(3)	(4)
1	Farfurwar	515	501	1016
2	Babo	1,823	1,411	2734
3	Sumuri	3,767	2,804	6071
4	Aroba	1,635	966	2601
5	Kaitaro	399	357	756
6	Kuri	481	425	906
7	Wamesa	602	549	1851
8	Bintuni	10,510	8,042	18852
9	Manimeri	2,954	2,359	5313
10	Tuhiba	327	286	613
11	Dataran Beimes	163	184	347
12	Tembuni	496	378	874
13	Aranday	515	540	1055
14	Kaomundan	322	337	659
15	Tomu	1,260	1,186	2446
16	Weriagar	664	619	1283
17	Moskona Selatan	262	247	509
18	Meyado	588	480	1068
19	Moskona Barat	188	171	359
20	Merdey	242	240	482
21	Biscoop	242	237	479
22	Masyeta	175	189	364
23	Moskona Utara	363	370	733
24	Moskona Timur	529	503	1032
Teluk Bintuni		**29,022**	**23,381**	**52,403**

Sumber : BPS 2008

Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih dominan dibandingkan dengan perempuan, yaitu 29.022 orang laki-laki (55,3%) berbanding 23.381 perempuan (44,7%).

Berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang terbesar pada perekonomian daerah, yaitu di atas 45 persen. Meskipun memberikan sumbangan terbesar, sumbangan sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 59,40 persen tahun 2006 menjadi 45,80 persen tahun 2009 walaupun luasan areal sawah dan produksi panen meningkat. Sektor yang sumbangannya terus mengalami kenaikan cukup signifikan dan stabil dari tahun ke tahun adalah sektor bangunan. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 11,20 persen dengan nilai Rp67,42 miliar tahun 2006 dan meningkat tahun 2009 menjadi sebesar 15,64 persen dengan nilai Rp162,89 miliar. Fenomena ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni dari pertanian mengarah pada sektor bangunan. Hal ini sangat wajar karena sejak dibentuknya Kabupaten Teluk Bintuni, bangunan-bangunan terus didirikan, baik bangunan pemerintah maupun bangunan lainnya yang didirikan masyarakat untuk permukiman, perniagaan, dan sarana prasarana perkantoran. Secara rinci nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4. Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006–2009 atas Dasar Harga Berlaku

No	SEKTOR	2006		2007		200		2009	
		Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
1	Pertanian	357.617,89	59,40	401.678,59	55,84	441.218,47	51,08	476.922,27	45,80
2	Pertambangan &	12.999,12	2,16	15.316,45	2,13	26.071,79	3,02	31.558,96	3,03
3	Industri Pengolahan	69.508,71	11,54	83.704,66	11,64	102.522,50	11,87	165.534,88	15,89
4	Listrik, Gas & Air	477,05	0,08	619,20	0,09	834,55	0,10	873,42	0,08
5	Bangunan	67.429,20	11,20	89.837,66	12,49	124.344,31	14,40	162.891,04	15,64
6	Perdagangan, Hotel-	18.441,89	3,06	25.298,12	3,52	35.317,55	4,09	44.271,54	4,25
7	Pangangkutan &	8.118,90	1,35	10.842,24	1,51	13.112,68	1,52	15.268,07	1,47
8	Keuangan, Sewa & Jasa	5.748,15	0,95	8.823,65	1,23	12.553,16	1,45	15.098,97	1,45
9	Jasa-Jasa	61.745,09	10,26	8.3181,61	11,56	107.788,79	12,48	129.009,46	12,39
	PDRB	**594.122,85**	**100**	**710.597,45**	**100**	**846.964,94**	**100**	**1.041.428,59**	**100**

Sumber : Diolah dari BPS, Teluk Bintuni dalam Angka, 2006-2010

Dari tabel di atas dapat diketahui pertumbuhan ekonomi di kawasan Teluk Bintuni. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendukung terciptanya kondisi perekonomian yang baik dan stabil. Dalam kurun lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni berada pada kondisi yang baik karena selalu di posisi pertumbuhan ekonomi 2 digit. Berdasarkan sektor, hanya ada satu sektor yang pertumbuhannya 1 digit, yaitu sektor pertanian. Hal yang

perlu diwaspadai adalah pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif, seperti tahun 2006 pada 11,10 persen dan mencapai puncaknya 12,87 persen tahun 2007, tetapi selanjutnya menurun. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan meningkat dari tahun ke tahun secara stabil hanya sektor industri pengolahan, bahkan di tahun 2009 meningkat tajam mencapai 23,6 persen (RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2011-2015).

3.1.5 Aspek Pendidikan

Pelayanan Pendidikan dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru-murid. Dari sisi layanan pendidikan sampai dengan tahun 2009 berdasarkan data *Teluk Bintuni dalam Angka 2010,* terdapat 145 sekolah yang terdiri dari 39 TK, 72 SD, 23 SMP, 10 SMU, dan 1 SMK. Sekolah TK tersebar di 12 distrik, sedangkan12 distrik lainnya belum memiliki TK. SD tersebar di 23 distrik dan hanya satu distrik yang belum memiliki SD, yaitu Distrik Biscoop. SMP tersebar di 17 distrik, sedangkan tujuh distrik lainnya belum memiliki SMP. Sementara itu, SMU/ SMA hanya terdapat di tujuh distrik dan 17 distrik lainnya belum memiliki SMU/SMA. Sementara itu, pertumbuhan siswa di setiap jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan seperti terlihat dalam gambar sebagai berikut,

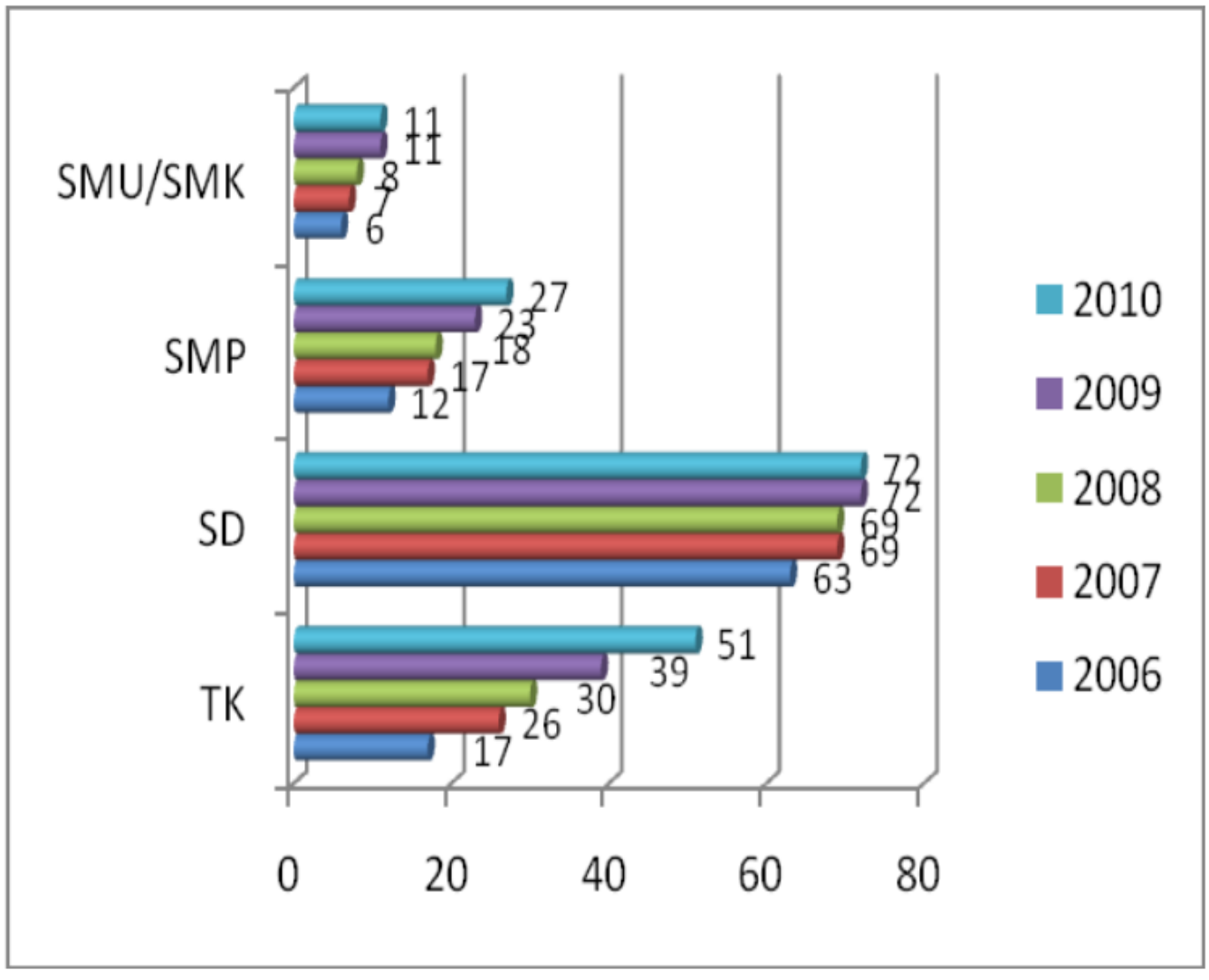

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Sarana Sekolah Tahun 2006–2010

Sumber: Diolah dari BPS, *Teluk Bintuni dalam Angka*, 2006-2009; Dikpora, 2010

Dari gambaran di atas menunjukan bahwa kapasitas sumberdaya manusia di kawasan Teuk Bintuni tetap didominasi untuk pemenuhan kelompok siswa tingkat sekolah dasar.

Berikut ini disampaikan kondisi jumlah siswa untuk setiap jenjang sekolah yan terjadi di kawasan Teluk Bintuni, yang dapat dilihat dalam gambar sebagi berikut,

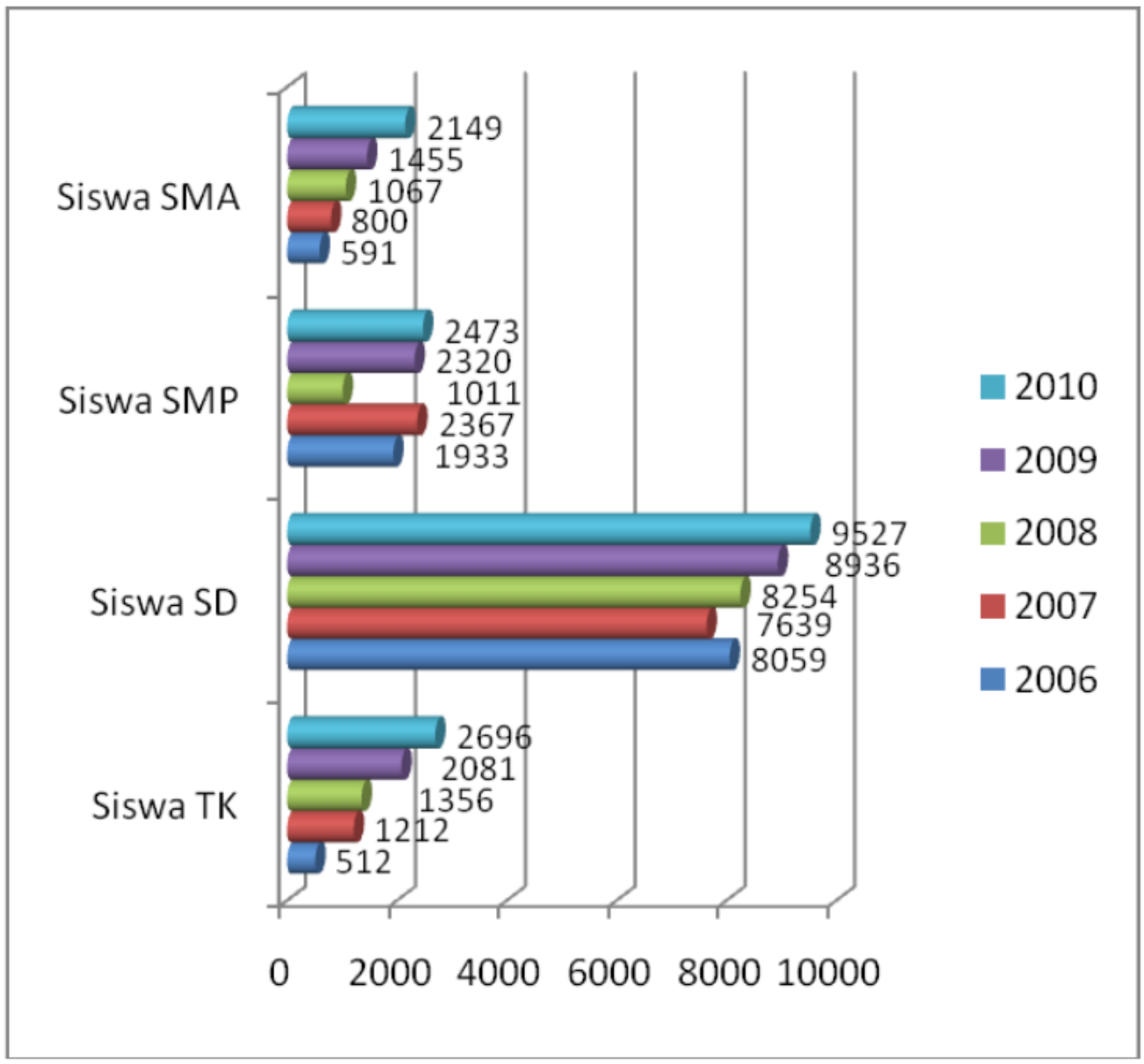

Gambar 3.2. Jumlah Siswa Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2006–2010

Sumber: Diolah dari BPS, *Teluk Bintuni dalam Angka*, 2006-2009; Dikpora 2010

Dari gambaran di atas menunjukan bahwa kondisi jumlah siswa berbanding lurus dengan pengadaan sarana, yaitu jenjang terbesar jumlah siswa sekolah ialah untuk kategori Sekolah Dasar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri guna mendorong percepatan sumber daya manusia dalam menciptakan pelaku usaha yang memiliki pengetahuan setara sekolah menengah atas.

Adapun komposisi lulusan sekolah dengan serapan pekerjaan dan pengangguran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut,

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Tabel 3.5. Tingkat Pendidikan, Serapan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Jenis Kegiatan Utama Activity During Previous Week	Pendidikan yang Ditamatkan			
	<= SD	SLTP	SLTA=>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja/(15 +) Working Age Population				
a. Angkatan Kerja/ Labour Force	12 130	5 156	8 144	25 430
i. Bekerja/ Employment	11 689	4 870	7 092	23 651
ii.Pengangguran Terbuka/ Open Unemployment	441	286	1 052	1779
b. Bukan Angkatan Kerja/ Non Labour Force	4 435	2 464	1 397	8 296
i. Sekolah/ Attending School	1720	1444	233	3397
ii. Mengurus Rumah Tangga House keeping	2477	813	978	4268
iii. Lainnya/ Others	238	207	186	631
2. T P A K / LFPR (%)	73,23	67,66	85,36	75,40
3. Tingkat Pengangguran Terbuka/ Unemployment Rate (%)	3,6	5,5	12,9	7,0

Sumber : Laporan Sosio Economic UGM 2009-2011

3.2. Informasi Dasar Pelaku Usaha

3.2.1 Aktivitas Usaha KUMKM

Pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Undang-UndangNomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Doven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Bintuni dimekarkan dari Kabupaten Manokwati pada 12 November 2002.

Visi Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni adalah:

> ***"Terwujudnya teluk Bintuni yang maju, demokratis, damai, tangguh dan sejahtera, serta berdaya saing atas landasan cinta kasih, kejujuran, keadilan dan kerja keras"***

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana termaktub RP JMD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2011 – 2015 adalah membangun manusia tangguh. Karakter mausia tangguh yang dimaksud adalah bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni hingga saat ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen yang utama

a. **Produktivitas**, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia;
b. **Ekuitas**. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatankesempatan ini.
c. **Kesinambungan**. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi

yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup- harus dilengkapi.

d. **Pemberdayaan**. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang beribukota di Distrik Bintuni dengan luas wilayah 18.637 Km2. Secara administratif, terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 97 Kelurahan. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Afiat Timur Kabupaten Sorong Selatan, Kecamatan kebaar, Testegea, Menyambaou, dan Sururey Kabupaten Manokwari di sebelah utara, Kecamatan Kaimana dan Kecamatan teluk Arguni Kabupaten Kaimana dan Distrilk Kokas Kabupaten Fakfak di sebelah selatan, Kecamatan Kokoda dan Kecamatan Afiat timur Kabupaten Sorong Selatan di sebelah barat, Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari, kecamatan Wamesa, serta Kecamatan Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan Kecamatan Yaur Kabupaten Nabire di sebelah timur.

Teluk Bintuni mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, perekonominan Teluk Bintuni bertumpu pada bidang pertanian khususnya kehutanan, Dari hutan produksi, diperoleh kayu bernilai ekonomis. Yang dominan antara lain merbau, matoa, nyatoh, pulai, mersawa, resak, medang, dan bintangur. Oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, produksi kayu bulat diekspor ke Jepang, Malaysia, dan Korea. Hutan Teluk Bintuni juga menghasilkan sagu, sagu merupakan bahan makanan pokok di daerah ini, Selain kayu bulat dan sagu, juga dihasilkan gaharu, rotan, minyak lawang, dan masoi. Masoi adalah kulit kayu sebagai bahan wangi-wangian. Di sektor perkebuan komoditi utama yang dihasifkan berupa kelapa sawit, kakao, cengkeh, kelapa, kopi robusta.

Perut bumi Teluk Bintuni terbilang kaya akan bahan tambang dan galian, Hampir seluruh kawasan mengandung gas alam cair (LNG), hasil tambang lainnya berupa batu bara, mika. Potensi sumber daya alam Teluk

Bintuni tidak hanya di daratan, Perairan kabupaten rnerupakan sumber daya ikan dan udang galah. Dengan potensi yang dimiliki ditunjang letak geografis yang strategis, Kabupaten Teluk Bintuni sangat mungkin menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepala burung ini. Dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah terdapat Bandara Bintuni yang trletak di Bintuni dan Pelabuhan Babo.

3.2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni

Perkembangan perekonomian wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Teluk Bintuni. Berikut ini gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Teluk Bintuni dalam tiga tahun terakhir,

Tabel 3.6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2010 (Juta Rupiah)

No	SektorlSub-sektor	PDRB Teluk Bintuni		
		2008	2009	2010
1	Pertanian	301.910,43	312.623,91	326.651,36
2	Pertambangan & Penggalian	12.145,33	12.711,62	12.922,48
	PRIMER	**314.055,76**	**325.335,53**	**339.573,84**
3	Industri Pengolahan	52.314,80	87.079,62	1.565.320,13
4	Listrik & Air Bersih	509,73	531,53	557,91

No	SektorlSub-sektor	PDRB Teluk Bintuni		
		2008	2009	2010
5	Bangunan	64.805,24	77.766,29	84.228,67
	SEKUNDER	117.629,77	165.377,44	1.650.106,71
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	20.788,88	23.959,67	26.404,42
7	Pengangkutan & Komunikasi	7.064,71	7.853,88	8.834,31
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	6_067,33	6.409,90	7.101,37
9	Jasa-Jasa	66.885,47	77.082,61	83.243,20
	TERTIER	**100.806,39**	**115.306,06**	**125.583,30**
	Produk Domestik Regional Bruto	**532.491,92**	**606.019,03**	**2.115.263,85**

Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni, 2010

Indikator hasil ekonomi pemerintah selain dilihat dari besarnya jumlah PDRB, perlu juga dilihat dad distribusi sektoralnya. kondisi perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni juga bisa dilihat dad kontribusi masing-masing sektor dan kelompok sektor ekonomi tefiadap total PDRB. Berikut ini gambaran kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dalam tiga tahun terakhir.

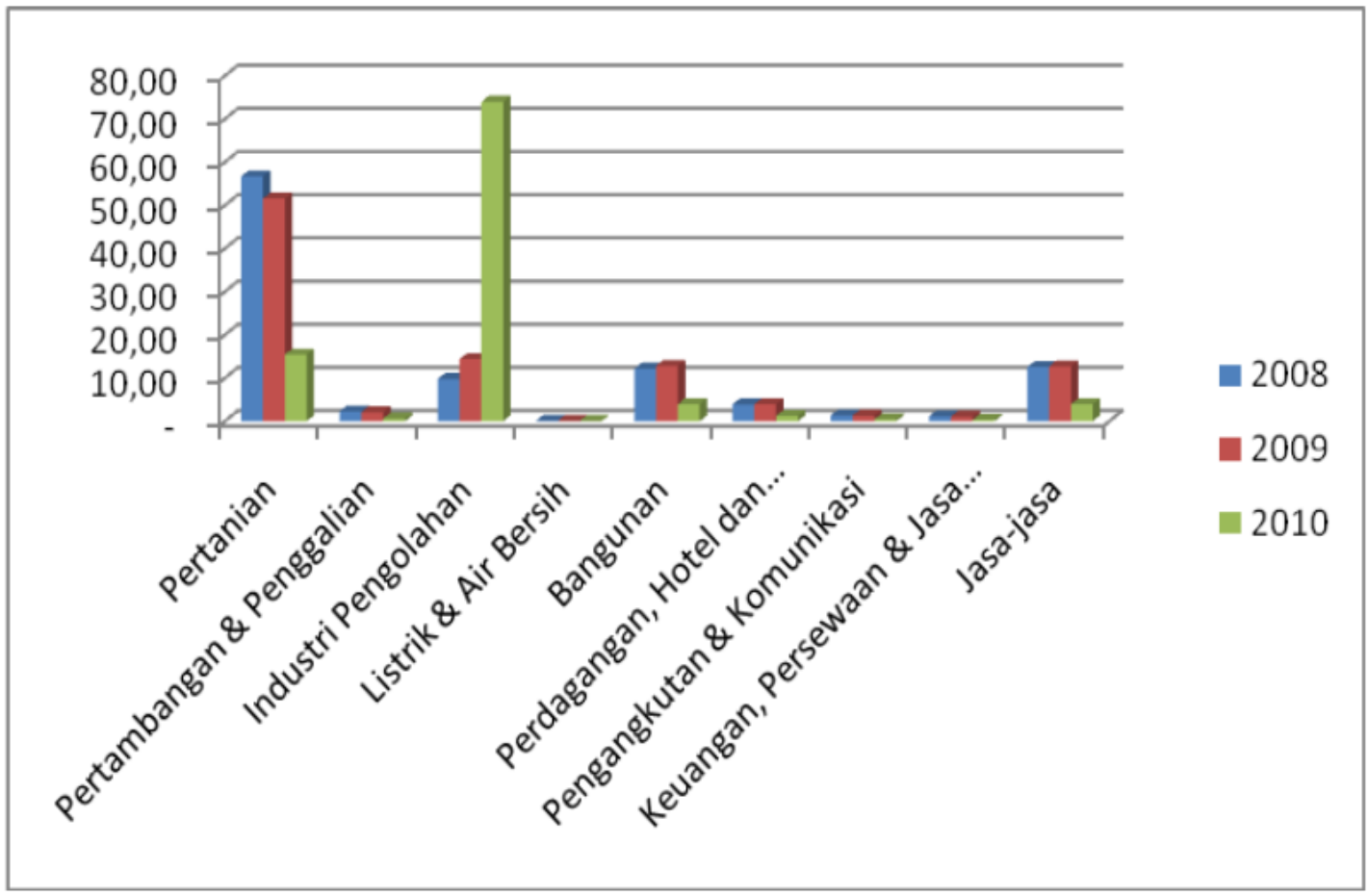

Gambar 3.3. Pertumbuhan Kontribusi Masing-Masing Sektor Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni (2008 - 2010)

Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni, 2010 (diolah)

Kontribusi sektoral tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Berikut kontribusi sektor dan kelompok sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni terhadap total PDRB Kabupaten Teluk Bintuni.

3.2.3. Keragaan Koperasi di Teluk Bintuni

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di sisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan koperasi diharapkan akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Dalam

upayanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi,

Tabel 3.7. Keragaan Koperasi di Teluk Bintuni Tahun 2010

No	Uraian	Satuan	Tahun 2009	Tahun 2010	Trend (%)
	Total Koperasi	Unit	26	127	3,88
1.	a. Kop. Aktif	Unit	20	38	0,90
	b. Kop. Tdk Aktif	Unit	6	89	13,83
2.	Anggota	Org/Kop	2570	5268	1,04
3.	RAT	Kop	3	-	-1
4.	Manager	Orang	15	5	-0,66
5.	Karyawan	Orang	17	-	-1
6.	Modal Sendiri	Rp.	270.000.000	5.020.897.000	17,59
7.	Modal Luar	Rp.	23.600.000	164.160.000	5,95
8.	Total Asset	Rp.	304.600.000	5.185.057.000	16,02
9.	Volume Usaha	Rp.	1.290.000	5.185.057.000	4018,42
10.	Sisa Hasil Usaha	Rp.	11.000.000	-	-1

Sumber: BPS, 2011

Berdasarkan tabet 3.7 di atas menunjukan bahwa jumlah koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 3,88% dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah koperasi sebesar 127 unit, dari jumlah ini koperasi yang aktif sebesar 38 unit dan koperasi yang tidak aktif sebesar 89 unit. .

Jumlah anggota koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 1,04 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah anggota koperasi sebesar 5268 orang sedangkan pada tahun 2009 sebesar 2570 orang.

Jumlah kegiatan RAT koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami penurunan sebesar 1 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 masih belum ada koperasi yang melakukan kegiatan RAT sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 3 koperasi .

Jumlah manager koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami penurunan sebesar 0,66 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah manager koperasi sebesar 5 orang sedangkan pada tahun 2009 sebesar 15 orang.

Jumlah karyawan koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 masih belum ada karyawan koperasi sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 17 orang.

Jumlah modal sendiri koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 17,59 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah modal sendiri koperasi sebesar Rp.5.020.897.000 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.270.000.000.

Jumlah modal luar koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah modal luar koperasi sebesar Rp.164.160.000 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 23.600.000.

Jumlah asset koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 16,02 % dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah asset koperasi sebesar Rp.5.185.057.000 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.304.600.000.

Jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2010 di Teluk Bintuni mengalami pertumbuhan sebesar 4.018,42% dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah volume usaha koperasi sebesar Rp.8.185.057.000 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.1.290.000. jumlah Sisa Hsil Usaha Koperasi pada tahun 2010 menglami penurunan dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi masih belum ada, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.11.000.000.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

3.2.4. Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Teluk Bintuni

Usaha pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usaha serta keberadaan investasi usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi mikro di atas selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pemberdayan usaha mikro, kecil dan menengah di Teluk Bintuni dilakukan dalam rangka; (a) pengembangan UMKM, usaha skala mikro, koperasi dan kelembagaan dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kemompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berwawasan gender dan (b) perluasan bisnis dan kesempatan berusaha, wirausaha baru, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Data pedagang di teluk Bintuni berdasarkan data BPS tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.8.. Data UMKM di Teluk Bintuni Tahun 2010

No	Uraian	Jumlah
1.	Pedagang Besar	101
2	Pedagang Menengah	317
3.	Pedagang Kecil	453

Sumber: Data Susi BPS Tahun 2006

Komitmen Pemerintah Provinsi Teluk Bintuni dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan PKM cukup besar, hal tersebut terlihat dari dukungan pembiayaan melalui dana APBD baik yang bersifat hibah maupun pinjaman lunak bergulir.

Jumlah pedagang besar menurut Kecamatan yaitu tertinggi berada pada Kecamatan Bintuni sebesar 85 unit, kemudian disusul Babo, Manimeri, Moskona Barat, Moskona Selatan dan Aroba secara berturut-turut sebesar 8, 5, 1, 1, 1 unit

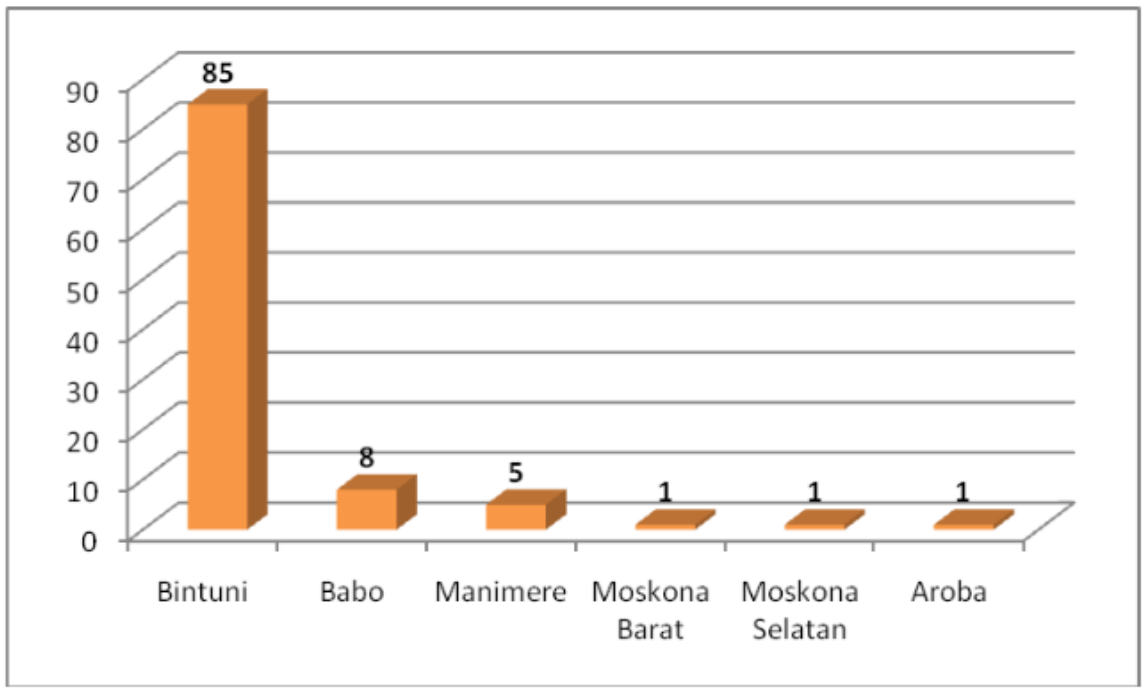

Gambar 3.4. Jumlah Pedagang Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Sumber: Teluk Bintuni dalam Angka, 2011 (diolah)

Sedangkan jumlah pedagang menengah menurut Kecamatan, tertinggi berada pada kecamatan Bintuni sebesar 256 unit, kemudian disusul Manimere, Babo, Tembuni, Dataran Beimes, Sumuri, Meyado, Maskona Utara, Maskona Barat, Merdey, Tuhiba, Biscoop, Maskona Selatan, dan Aroba secara berturut-turut sebesar 17, 10, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1 unit dan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 51/119

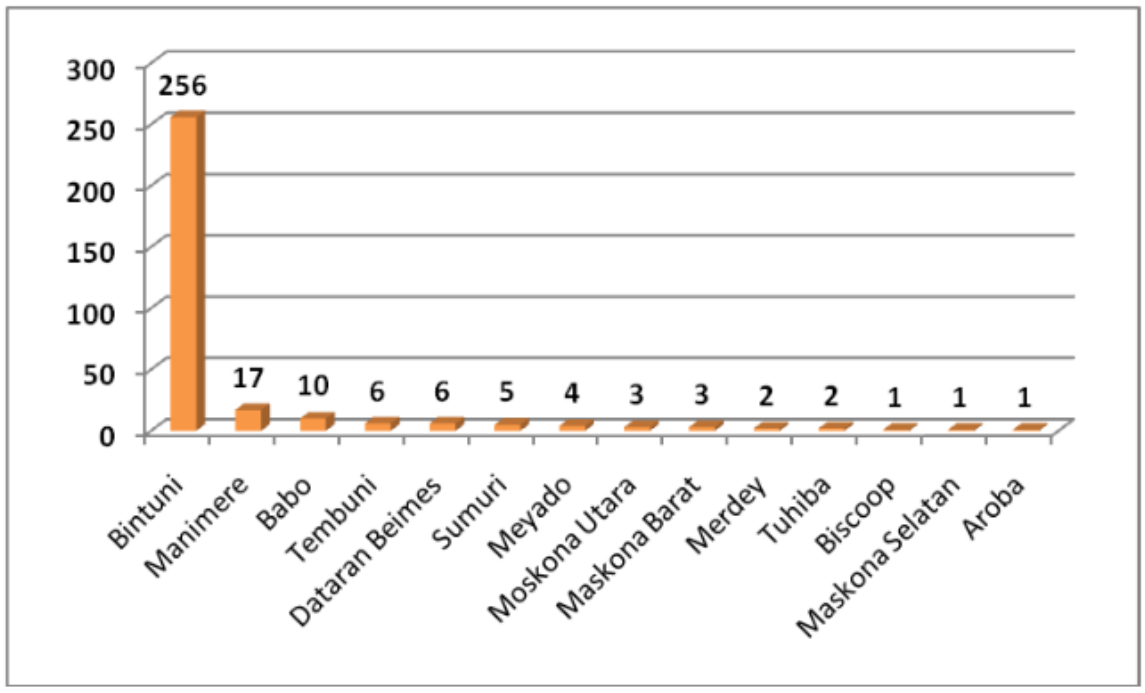

Gambar 3.5. Jumlah Pedagang Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni

Sumber: Teluk Bintuni dalam Angka, 2011 (diolah)

Adapun jumlah pedagang kecil menurut Kecamatan, tertinggi berada pada Kecamatan Bintuni sebanyak 372 unit, kemudian disusul Manimere, Babo, Meyedo, Maskona Selatan, Merdey, Tuhiba, Dataran Beimes, Sumuri, Tembuni, Maskona Timur, Maskona Utara, Aranday, Idoor, dan Aroba secara berturut-turut sebanyak 22, 15, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1 unit dan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

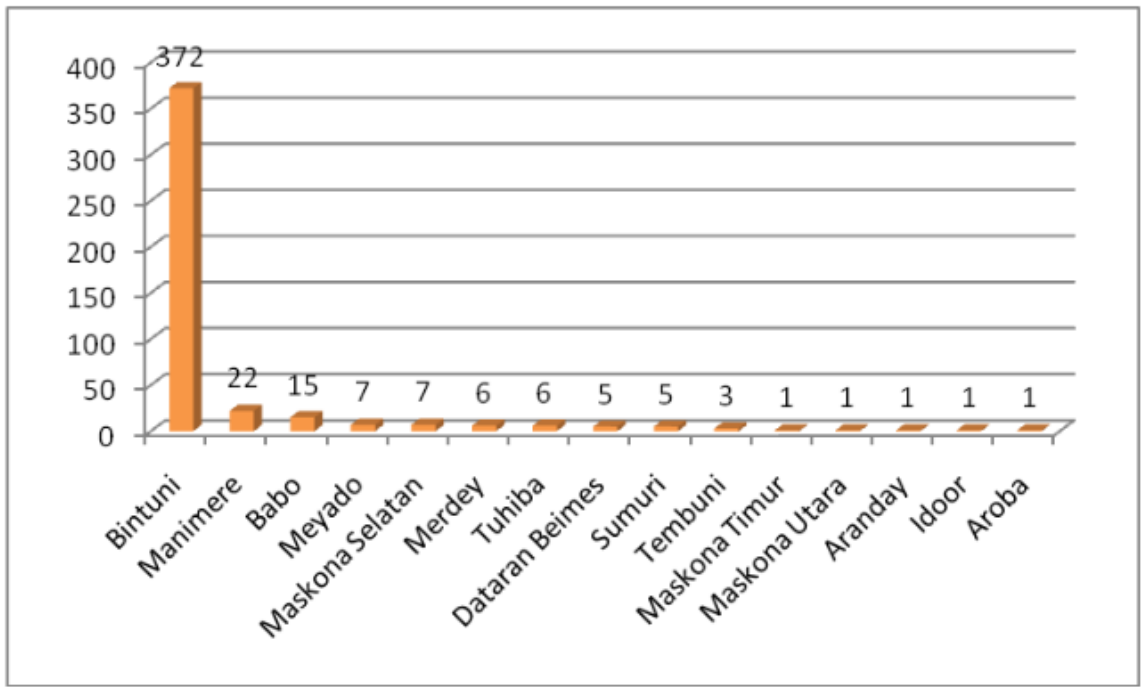

Gambar 4.4. Jumlah Pedagang Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Sumber: Teluk Bintuni dalam Angka, 2011 (diolah)

3.2.5 Arah Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Teluk Bintuni

Rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional, sasaran pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Indonesia adalah UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan

perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Teluk Bintuni, sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah makin meluasnya lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan terbukti dalam PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan meningkat secara stabil dari tahun ke tahun, namun peningkatan di sektor industri pengolahan tidak diikuti oleh peningkatan industri kecil, dan makin meningkatnya pemerataan peningkatan pendapatan. Selain itu industri unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum dikelola secara optimal, bahkan Pemerintah Daerah belum menentukan produk-produk unggulan yang akan dikembangkan sebagai produk khas Teluk Bintuni. Hal ini diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia. Sehingga isu-isu strategis yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menentukan arah kebijakan pengembangan UMKM masyarakat lokal antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam sebagai ciaya tarik investasi dan bisa dikembangkan untuk industri dan perclagangan.
2. Komitmen pemerintah daerah untuk mendorong investasi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
3. Otonomi khusus yang memungkinkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro terhadap usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM).

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Maka dari itu, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat lokal.;
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* terutama untuk:
   a. Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan, koperasi dan lembaga keuangan mikro
   b. Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan yang terkait dengan Hak Ulayat masyarakat Lokal Papua.
   c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
   d. Mendesain pola keterkaitan antara perusahaan swasta (besar) dengan UMKM dengan mengugunakan pola inti plasma untuk mempermudah tugas UMKM dalam hal teknologi, pemasaran maupun manajemen organisasi UMKM.
   e. Memperkuat posisi tawar petani nilam, pala dan buah merah masyarakat lokal dengan peningkatan mutu produk.
   f. Membangun kerjasama lokal, regional dan nasional dalam penanganan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi.
   g. Pembagian tugas dan tangguang jawab diantara uns
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan:

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi.
b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan *Clusterisasi product* disetiap distrik di sektor agrobisnis dari hasil-hasil pertanian masyarakat lokal seperti nilam, buah merah maupun pala dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha untuk memperoleh biaya produksi yang lebih efisien.
c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam Konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap distrik *(one district one product).* Pengembangan ini harus dilaksanakan mengingat jarak antar distrik yang terlalu jauh dan aksesibilitas yang belum memadai (jalan, jembatan, trnsportasi) sehingga apabila dilakukan pada satu central produksi akan menimbulkan biaya produksi yang tinggi.

4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
5. Pembentukan *Holding Company* dalam bentuk BUMD yang mempunyai tugas untuk melakukan penanganan perusahaan milik daerah maupun swasta dalam setiap sektor industri, baik yang bergerak dalam bidang pertanian seperti pembentukan divisi pengembangan agribisnis dalam bidang pengembangan produks nilam, pala dan buah merah ataupun dalam bidang perikanan seperti pembentukan divisi yang membawahi beberapa perusahaan swasta seperti Coolstory dan perusahaan pembuatan abon ikan serta bidang-bidang dalam sektor lainnya yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni
6. Optimalisasi penggunaan CSR *(Corporate Social Responsbility)* yang di miliki perusahaan swasta sebagai pusat pengembangan UMKM

masyarakat lokal. Dengan adanya CSR ini diharapkan perusahaan juga berperan aktif untuk ikut memberdayakan dan mengembangkan UMKM masyarakat lokal papua.

3.3. Pemberdayaan Pelaku Usaha Oleh The Tangguh LNG

Pemahaman pelaku usaha di Kabupaten Teluk Bintuni pada dasarnya terbagi atas dua kelompok, yaitu :

a. Local Firm yang selama ini selalu berhubungan dengan BHBEP
b. Usaha Mikro dan Kecil yang selama ini selalu berhubungan dengan Livelihood Departement dan Bina Swadaya Konsultan

Local firm terdiri atas tiga kelompok utama yaitu :

a. Skala kecil dengan net equity sebesar kurang atau sama dengan Rp 5 Milyar
b. Skala menengah dengan net equity sebesar lebih dari Rp 5 Milyar dan kurang dari Rp 10 Milyar
c. Skala besar dengan net equity sebesar lebih dari Rp 10 Milyar

Adapun pemilahan kriteria pelaku usaha UMKM didasarkan atas UU No. 20/2008, yang menyebutkan bahwa :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 57/119

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Aktivitas local firm difasilitasi oleh BHBEP dengan nilai transaksi antara pengusaha/ local firm dengan BP Indonesia, sebesar Rp 15 juta sampai Rp 17 juta US$, sedangkan aktivitas di tingkatan pelaku usaha UMKM dilakukan oleh Livelihood Department dengan nilai pembinaan sebesar Rp 6 Milyar per tahun. Jumlah pelaku usaha (local firm) yang terlibat transaksi dengan BP Indonesia ialah sebesar 10%. Terdapat 48 perusahaan dari 500 perusahaan yang bertransaksi dengan BP Indonesia. Dari 500 perusahaan terdapat 222 perusahaan indigenous people dan 92 perusahaan ditangani oleh perempuan. Sementara untuk UMKM diperkirakan 20% ditangani oleh Livelihood Department dan Bina Swadaya Konsultan.

3.3.1. Permasalahan Pembangunan dan Sosio Ekonomi

Permasalahan pembangunan (Disperindagkop & UKM Kab. Teluk Bintuni, 2011) di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan;
3. Lemahnya sistem dan regulasi;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan;
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas kesehatan;
6. Terbatasnya akses sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, irigasi, persampahan, listrik, telekomunikasi dan perhubungan;
7. Lemahnya manajemen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
8. Kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Dari permasalahan pembangunan yang ada, serta pertimbangan dan pemahaman terhadap berbagai kondisi lokal, maka ditetapkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni dan tantangannya beberapa tahun kedepan sebagai berikut;

- Masih **Rendahnya Kualitas Hidup dan Kesejahteran Masyarakat**, terutama yang dialami oleh masyarakat asli 7 suku, yang merupakan dampak dari dari berbagai akumulasi dan faktor penyebabnya (Tercermin melalui IPM Kab. Teluk Bintuni) antara lain ;
    1. Rendahnya Pemenuhan Hak Dasar terhadap Pendidikan yang merata dan berkualitas;
    2. Rendahnya Pemenuhan Hak Dasar terhadap cakupan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
    3. Rendahnya Pemenuhan Hak Dasar terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan sisi sosial-ekonomi individu, keluarga dan kelompok masyarakat.
- Masih **tingginya tingkat pengganguran terbuka**, yang berpengaruh terhadap beban pembangunan dan perekonomian;
- Masih **rendahnya ekonomi daerah dan ekonomi rakyat** yang disebabkan oleh masih terbatasnya investasi dan usaha produksi berskala besar, serta rendahnya produktifitas pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan hasil hutan serta pertambangan.
- Masih **rendahnya ekonomi rakyat secara khusus bagi masyarakat lokal**, yang disebabkan oleh rendahnya fasilitasi pemerintah dan swasta, rendahnya keterlibatan dan terbatasnya pemasaran. (ekonomi relatif masih dimotori oleh masyarakat non lokal).

Adapun permasalahan-permasalahan yang terdientfikasi (Disperindagkop & UKM Teluk Bintuni) dalam bidang sosio ekonomi yang dihadapi ialah :

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

1) Peranserta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum optimal

(1) Kepastian hukum yang rendah;
(2) Kurangnya insentif investasi;
(3) Kualitas sumberdaya manusia yang rendah;
(4) Terbatasnya infrastruktur;
(5) Biaya ekonomi tinggi; karena penyalahgunaan wewenang, belum terjaminnya keamanan berusaha, kurang efektifnya peraturan pemerintah;

2) Sektor Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai kendala

(1) Rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi
(2) Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif;
(3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi;
(4) Kurang kondusifnya iklim usaha.

3) Sektor Pertanian

(1) Produktivitas, efisiensi usaha yang rendah serta , keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kredit dan infrastruktur pertanian masih belum teratasi
(2) Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan masih tergolong rendah yang ditandai masih tingginya angka kemiskinan.
(3) Terbatasnya akses ke sumberdaya produktif, terutama permodalan yang disertai dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian;
(4) Penguasaan teknologi masih rendah;
(5) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan;
(6) Lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) pertanian.

4) Sektor Perdagangan

(1) Umumnya masyarakat asli tidak terbiasa berdagang, sebab didominasi oleh pendatang/ non papua (Sulawesi dan Jawa)
(2) Bahan-bahan yang diperdagangkan didatangkan dari Sorong dan Surabaya, sehingga harga barang relatif lebih mahal.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 60/119

(3) Belum optimal dalam pengendalian barang, kestabilan harga barang, pembinaan terhadap pedagang dan pengelolaan kelembagan perdagangan.

5) Daya saing

(1) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi daerah;

(2) Kualitas kelembagaan publik belum menunjang fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan;

(3) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi peningkatan produktivitas;

(4) Efisiensi usaha yang rendah pada tingkat operasionalisasi perusahaan;

(5) Iklim persaingan usaha yang rendah.

6) Terbatasnya infrastruktur dasar ekonomi

(1) Transportasi darat masih belum memadai baik sarana maupun prasarananya

a). Sistem jaringan jalan di Provinsi PAPUA BARAT belum dapat menghubungkan antar wilayah kawasan yang memiliki potensi tinggi dan cepat tumbuh;

b). MekaniUMKM pendanaan yang masih mengacu pada batas-batas administrative wilayah, sehingga berdampak belum terbentuknya suatu jaringan transportasi yang terpadu di Provinsi Papua Barat;

c). Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah.

(2) Transportasi laut di Provinsi Papua Barat dari segi infrastruktur masih terbatas

a). Terbatasnya prasarana pelabuhan yang memadai;

b). Terbatasnya fasilitas pelabuhan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran bongkar muat di pelabuhan;

c). Ketersediaan fasilitas keselamatan di pelabuhan masih rendah;

(3) Alur pelayaran sungai dan penyeberangan belum memadai

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

a). Keterbatasan jumlah prasarana dan sarana penyeberangan;

b). Terbatasnya sarana yang tersedia;

c). Kurangnya keterpaduan pembangunan;

d). Terbatasnya keterjangkauan pelayanan;

e). Peran swasta dan Pemerintah Daerah yang belum optimal.

(4) Sarana dan prasarana penerangan (listrik), Telekomunikasi dan Air bersih masih terbatas

a). Jaringan listrik hanya mampu melayani perkotaan

b). Layanan telepon selular pada distrik-distrik belum optimal

c}. Jaringan dan layanan air bersih masih terpusat di pusat kota

7) Tendensi Aglomerasi

(1) Banyaknya daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan;

(2) Belum berkembangnya daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh;

(3) Kurang berfungsinya sinergiUMKM pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan sehingga peran daerah perkotaan sebagai ”engine of development” belum berjalan dengan baik;

(4) Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan;

(5) Daerah-daerah terpencil kondisinya masih terbelakang.

3.3.2 Kebijakan *Stakeholders* Dalam Pembangunan dan Sosio Ekonomi

3.3.2.1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Bintuni

A. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan bijaksana secara adil dan merata;
2. Memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang ada bukan semata-mata untuk kepentingan sesaat dan generasi sekarang, akan tetapi juga memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam hal ini pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada daya dukung dan daya

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

tampung lingkungan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada dan berkembang di masyarakat berlandaskan cinta kasih sesama;

3. Pemberdayan potensi sumber daya manusia merupakan tantangan kedepan untuk lebih diperhatikan sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh, jujur dan mempunyai daya saing;
4. Meminimalkan kesenjangan-kesenjangan sosial kemasyarakatan yang masih terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni yang dikuatirkan dapat memicu lambannya proses pembangunan dengan pemenuhan hak dasar hidup yang sesuai dengan karakteristik lokal secara demokratis;
5. Pemenuhan kebutuhan fasilitas, infrastruktur daerah, pembukaan isolasi derah serta dukungan regulasi dan anggaran akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang lebih maju dan damai.

B. Kondisi yang Diinginkan

1. Pembangunan di bidang UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang tidak terlepas dari pendekatan dalam kerangka menjaga kesinambungan pembangunan kabupaten secara utuh, termasuk memperhatikan juga kesinambungan perencanaan pembangunan terhadap keterpaduan program dan kegiatannya yang dipadukan dengan program dan kegiatan dari provinsi maupun nasional.
2. Pembangunan di bidang UMKM merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk menuntaskan dan menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari masih rendahnya kemandirian (keberdayaan masyarakat) serta rendahnya aspek produktifitas dan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pembangunan di bidang UMKM ditujukan dalam rangka mengatasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan sarana prasarana dasar perdagangan seperti pasar tradisional maupun

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

modern, unit-unit pertokoan, pengawasan dan pengendalian pasar barang dan harga barang, serta pengendalian ekspor dan impor skala daerah; penyediaan sarana dan prasarana industri seperti penyediaan kawasan industri, pemberian fasilitas industri bagi masyarakat yang berusaha di bidang industri, penyederhanaan sistem regulasi di bidang industri skala daerah, serta pembinaan usaha industri; penyediaan sarana dan prasarana koperasi, pembinaan koperasi serta pemberian bantuan modal kepada koperasi; pembinaan dan pengawasan kepada usaha-usaha mikro kecil dan menengah; serta pemberian bantuan modal usaha kecil; memperkuat kerjasama investasi dan penanaman modal; serta penyederhanaan regulasi investasi dan penanaman modal.

3.3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Salah satu misi yang ditetapkan ialah rencana pembangunan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing bagi terciptanya iklim usaha dan investasi yang mendorong tumbuhnya kesempatan kerja dan berkembangnya perekonomian daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai ialah :

a. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai
c. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya local.

Adapun sasaran yang ingin dicapai ialah :

1) menurunnya secara nyata tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, serta tumbuhnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif
2) meningkatnya penanaman modal
3) meningkatnya laju pertumbuhan dan kondisi perekonomian

daerah, terciptanya lapangan kerja secara memadai, semakin kuatnya struktur perekonomian daerah dengan mantapnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang didukung oleh sektor-sektor lainnya secara sinergis, berkembangnya ekonomi kerakyatan serta semakin berperannya usaha daerah, koperasi, dan swasta untuk menciptakan daya saing yang tinggi demi kemajuan perekonomian daerah.

Dari dua kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan, maka dapat ditarik suatu isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Keberadaan The Tangguh LNG dalam kondisi saat ini belum sepenuhnya dapat memfasilitasi pelaku usaha terutama dari sektor pelaku usaha UMKM.
2. Regulasi yang dilakukan oleh BP Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa memiliki standar yang ketat, yang menyebabkan jumlah keterlibatan pengusaha (local firm) dalam bertransaksi menjadi sangat rendah. Ketatnya regulasi pengadaan barang dan jasa menyebabkan pelaku usaha UMKM sampai saat ini belum dapat melakukan transaksi dengan BP Indonesia (PSCM).
3. Belum ada sinkronisasi antara kebijakan pemberdayaan UMKM baik dari BP Indonesia, Pemkab dan Kabupaten Bintuni dalam implementasi di tingkat lapangan, sehingga dikhawatirkan terjadi pemberdayaan yang sifatnya parsial yang menjurus ke arah ego sektoral.
4. Rendahnya skala ekonomi pelaku usaha UMKM sehingga kebijakan ke depan untuk pendekatan open area/ classical approach tidak akan banyak berpengaruh pada pengembangan usaha.
5. Perlunya skim kredit yang cocok untuk pelaku usaha UMKM dalam upaya meningkatkan skala ekonomi, sebab peningkatan skala ekonomi identik dengan peningkatan investasi dan modal kerja

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

BAB IV
ANALISIS KELEMBAGAAN, USAHA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KUMKM

4.1. Kelembagaan

Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatan pendapatan masyarakat.Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah khususnya di Teluk Bintuni. UMKM juga dapat memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang potensial di Teluk Bintuni yang belum diolah secara komersial.UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi :

(1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusahaseluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi.

(2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.

(3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha UMKM.

(4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Keberadaan dari UMKM dikawasan Teluk Bintuni selalu berkaitan dengan lembaga usaha, yaitu koperasi, kelompok usaha bersama dan lembaga otonom usaha. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kelembagaan usaha di Teluk Bintuni, terus mengembangkan diri untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Adanya kegiatan BP Indonesia mendorong kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian-Perdagangaan dan Koperasi dalam 5 tahun terahir pertumbuhan bentuk badan usaha berdasarkan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dapat dilihat di tabel 4.1 dimana telah terdaftar 978 Badan Usaha dimana 65,7% diantaranya dalam bentuk CV, 11,9 % berbentuk PT,8,2% berbentuk koperasi sementara 18,5% dalam bentuk badan usaha lainnya. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebabagi berikut :

Tabel 4.1. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

NO	BENTUK BADAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012	JUMLAH
1	PERSEROAN TERBATAS (PT)	23	32	15	24	23	117
2	KOPERASI	3	2	-	1	2	8
3	PERSATUAN KOMANDITER (CV)	209	178	90	80	86	643
4	BADAN USAHA LAIN	6	36	76	52	40	210
							978

Sementara dilihat dari penerbitan surat ijin usaha.menunjukan bahwa adanya kecenderungan trend yang positif dalam kegiatan usaha,seperti yang terlihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2. Penerbitan Surat Ijin Usaha

NO	BENTUK BANDAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012	JUMLAH
1	PERSEROAN TERBATAS (PT)	23	25	25	40	31	144
2	KOPERASI	3	4	2	3	10	24
3	PERSATUAN KOMANDITER (CV)	209	112	153	270	236	983
4	BADAN USAHA LAIN	6	106	126	147	128	517
							1668

Sumber : Dinas Koperindag Teluk Bintuni ,2013

Berdasarkan penerbitan surat izin usaha perdagangan,menunjukan bahwa 60,3% badan usaha di Teluk Bintuni bergerak dalam sektor perdagangan dimana,skala usaha kecil masih mendominasi

Tabel 4.3. Rekapitulasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	BENTUK BADAN USAHA	SKALA	2008	2009	2010	2011	2012	JUMLAH
1	PERSEROAN TERBATAS (PT)	KECIL	4	2	-	-	-	6
		MENENGAH	4	3	4	3	3	17
		BESAR	7	5	8	15	5	40
2	KOPERASI	KECIL	1	-	-	-	2	3
		MENENGAH	1	1	-	-	-	2
		BESAR	-	-	-	2	-	2
3	PERSATUAN KOMANDITER (CV)	KECIL	76	66	40	40	31	253
		MENENGAH	91	94	37	56	104	382
		BESAR	18	14	9	12	19	72
4	BADAN USAHA LAIN	KECIL	9	43	64	45	39	200
		MENENGAH	2	2	8	8	2	22
		BESAR	-	2	1	3	1	7
	TOTAL							1006

Sumber : Dinas Koperindag Teluk Bintuni ,2013

Kelembagaan usaha dalam bentuk badan usaha koperasi di Teluk Bintuni masih sangat sedikit, dari 13 distrik hanya terdapat 17 koperasi dengan total anggota 555 orang, di mana anggota laki-laki 79,82% dan anggota perempuan 20,18%. Keikutsertaan perempuan sebagai anggota koperasi menunjukan kecenderungan yang meningkat, hal ini juga dipengaruhi dengan kehadiran LNG Tangguh yang dapat menyerap tenaga kerja laki-laki, sehingga perempuan menambah perannya sebagai pengelola pertanian. Walaupun jumlah koperasi relatif sedikit namun berperan banyak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat,hal ini terjadi karena hasil

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 70/119

pertanian masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat diserap oleh BP melalui PT Indocater.

Tabel 4.4. Keragaan Koperasi Berdasarkan Distrik Per Maret 2013 Kabupaten Teluk Bintuni

NO	DISTRIK/JENIS KOPERASI	KOPERASI (UNIT)	ANGGOTA			MODAL SENDIRI (Rp)
			JMLAH (org)	LAKI-LAKI (org)	PEREM-PUAN (org)	
1	KSP	2	48	31	17	73.360.000
2	KSU	3	139	113	26	58.800.000
	DIST, FAFURWAR					
1	KSU	1	31	26	5	10.000.000
	DIST. MERDEY					
1	KSU	1	25	11	14	675.000
	DIST. MANIMERI					
1	KSU	1	28	28	0	6.440.000
	DIST. MOSKONA UTARA					
1	KSU	1	25	19	6	1.375.000
	DISTRIK MOSKONA BARAT					
1	KSU	1	29	24	5	1.350.000
	DIST.MOSKONA SELATAN					
1	KSU	1	35	27	8	1.400.000
	DIST. WERIAGAR					
1	KSU	1	45	45	0	51.215.000
	DIST. WAMESA					

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

1	KSU	1	25	25	0	21.375.000
	DIST. AROBA					
1	KSU	1	22	14	8	1.125.000
	DIST. SUMURI	2	78	74	4	10.320.000
1	KSU	1				
	DISTRIK BABO					
1	KSU	1	25	6	19	2.500.000
	JUMLAH	**17**	**555**	**443**	**112**	**239.935.000**

Sumber : Dinas Koperindag Teluk Bintuni ,2013

Berdasarkan hasil survey lapangan, maka kelembagaan yang mendukung pengembangan UMKM di Teluk Bintuni dapat digambarkan sbb:

Tabel 4.5. Kondisi Kelembagaan di Lokasi Kajian

LOKASI	KONDISI KELEMBAGAAN
Distrik Bintuni Nama Koperasi : Koperasi Bintuni Mandiri Ketua Koperasi : Kris Mailoa (Merangkap sebagai Kepala Bidang Koperasi Kab. Teluk Bintuni)	➢ Koperasi Teluk Bintuni bukan merupakan koperasi yang tidak berada dalam binaan (DAV's) dari BP Indonesia, tetapi melakukan transaksi dengan PT Indocater. ➢ Ketua Pengurus Koperasi Merangkap sebagai Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga apabila dilihat dari kepentingan umum akan sangat rawan terjadi peselisihan ➢ Tidak ada laporan yang bisa dijadikan sebagai acuan kajian, semuanya disampaikan secara lisan. Ketua pengurus sangat menguasai kondisi lapangan,termasuk pola tanam setiap komoditi.
Distrik Babo Nama Koperasi : Matambay Siri	➢ Koperasi Matambay Siri baru saja melakukan penggantian pengurus

Berdiri :10 Juli 2010 Jumlah Anggota : 68 Orang (42 Orang petani sayuran dan 24 Orang penangkap kepiting) Modal awal : 2 X Rp 30.000.000 bantuan BP. Iuran pokok dan iuran wajib dari anggota belum dilakukan	dikarenakan adanya dugaan salah urus yang menyebabkan kekurangpuasan anggota dan menghambat kemajuan koperasi. ➢ Pengurus dan anggota koperasi merasa belum memahami cara berkoperasi dengan benar, walaupun BP menyediakan pendampingan koperasi tetapi belum menyelenggarakan pelatihan koperasi yang dapat dipahami oleh pengurus dan anggota koperasi Matambey Siri. ➢ Adanya kesalah pahaman dan salah urus koperasi, diantaranya dikarenakan oleh kekurang pahaman mereka dalam mengelola koperasi yang benar.
Distrik Weriagar Nama Lembaga : KUB WERIAGAR Jumlah Anggota :40 Orang Tahun Berdiri : 2011 Bidang Usaha : Udang Nama Ketua : Lukman Muchtar .	➢ Koperasi ini hanya dikelola oleh keluarga Lukman Muchtar dan belum ada dukungan dari masyarakat OAP ➢ Pencatatan KUB belum memadai, hanya sebatas PO dari PT Indocater. ➢ Sampai saat ini masih berupa KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan belum ada upaya untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum, yang disebabkan belum siapnya SDM dari masyarakat setempat ➢ Informasi dari Kepala Kampung Weriagar bahwa KUB belum merupakan bagian dari perangkat desa
Kampung Tanah Merah Nama Koperasi : KSU Mayri Tanah Merah Tahun Berdiri : Maret 2005 (Badan Hukum Kop) Ketua Pengurus : Thomas Jumlah Anggota : 70 Orang petani Jumlah Kel Tani : 4 Kelompok Tani Iuran pokok dan iuran wajib dari anggota belum dilakukan	➢ Pelaksanaan aktivitas kelembagaan dilakukan oleh pengurus koperasi dan kelompok tani ➢ Keberadaan kelompok tani sangat mendukung kelangsungan kelembagaan koperasi

Kampung Saengga Nama Lembaga : UNOPERTA (Unit Otonom Perempuan Tani) Jumlah Anggota : 23 Orang Bidang Usaha : Produksi sayuran Nama Ketua : Mama Sarah	➢ Dirasakan adanya indikasi kurang harmonisnya antara ketua pengurus koperasi dengan salah satu pihak di jajaran pengurus kampong sehingga menyebabkan koperasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya ➢ Terdapat potensi masalah yang cukup krusial berkaitan dengan mata pencaharian warga di Distrik Saengga yaitu hanya sebagian kerja yang bekerja sebagai petani dan nelayan,sedangkan sebagian besarnya tidak memiliki pekerjaan ➢ Kegiatan Unoperta sejak tahun 2012 sedang mengalami kemunduran,sehingga kegiatan bertani dan menjual produk sayurannya dilakukan secara individu
Kampung Tofoi Nama Koperasi : KSU Imuri Jumlah Anggota : 38 orang Ketua Koperasi : Ibu kepala Desa Sekretaris : Mama Regina Kondisi Keuangan : Omzet penjualan per 5-04-2013 Rp 212.618.751 Simpanan pokok dan wajib Rp 9.571.300 Cadangan Rp 120.185.000 Kas Rp 21.089.000	➢ KSU Imuri adalah gambaran sebuah koperasi sebagai wadah bersatunya pelaku usaha kecil bidang pertanian yang berhasil mensejahterakan anggotanya dengan jumlah pendapatan rata-rata antarap Rp 3.000.000 s/d Rp 7.000.000 /bulan/orang ➢ KSU Imuri merasakan sekali manfaat pembinaan dari BP dibandingkan dengan perhatian dari pemerintah daerah setempat. ➢ Pengurus Koperasi selama ini lebih banyak belajar mandiri tentang perkoperasian karena belum ada pembinaan atau pendampingan dari BP maupun Pemerintah Daerah

Sumber : Data yang diolah.

4.2. Aspek Usaha Dalam Pengembangan Usaha

Berdasarkan hasil survey sebagian besar masyarakat berusaha di bidang pertanian dan perikanan, walaupun bidang-bidang usaha lainnya mulai dikembangkan. Aktivitas UMKM lainnya yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni seperti usaha penjualan pinang, usaha penjualan sayuran, pembuatan tahu tempe, pembuatan kerupuk ikan/ udang/ kepiting, pembuatan keripik, pembuatan makanan ringan / kue-kue, usaha penjualan barang sembako dan usaha jahit menjahit. Semua pengadaan komoditi tersebut dapat terjual melalui koridor PT. Indocater, sebagai perusahaan yang dipercaya oleh BP Indonesia dalam menyediakan catering bagi karyawan BP Indonesia yang berada di Proyek Tangguh dan juga dijual ke pasar umum.

Para pelaku UMKM bidang pertanian diharuskan bergabung dalam wadah koperasi atau kelompok tani sebagai syarat untuk bisa bekerjasama sebagai pemasok bahan mentah kepada PT. Indocater, hal ini juga merupakan bagian Supply Chain yang dibangun oleh PSCM BP Indonesia. Adapun produksi petani anggota koperasi dikumpulkan di Stocking Point dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6. Data Stocking Point di Teluk Bintuni

NO	NAMA	LOKASI	JENIS PRODUK	PRODUK-SI (KG)	OMZET (RP)	SHU(Rp)
1	KSU MATAM-BAY SIRI	BABOO	SAYUR-BUAH-KEPITING	23.329	415.403.000	413.403.000
2	KSU IMURI	TOFOI	SAYUR-BUAH	48.966	968.364.925	908.164.925
3	KSU MAYERI	TANAH MERAH	SAYUR-BUAH	12.359	226.350.500	276.350.500
4	KSU KOKANGGO NINGAWO	TAROI	UDANG	8.779	526.340.000	
5	KUB WERIAGAR	WERI-AGAR	UDANG	9.799	587.440.000	
6	KSU BINTUNI MANDIRI	BINTUNI	SAYUR-BUAH	242.419	5.321.239.300	
7	KSU ENENEM JAYA	ARGUNI	IKAN	17.922	395.235.000	
				363.572	8.380.372.725	

Sumber : Data yang diolah.

Petani yang terlibat dalam kegiatan produksi pertanian tergambar dalam tabel 4.7,petani terbanyak ada di kampung Tanah Merah,hal ini diduga erat kaitannya dengan dekatnya lokasi LNG Tangguh.

Tabel 4.7. Rekapitulasi Petani yang Terlibat Dalam Produksi Pertanian

NO	LOKASI	PRIA	WANITA	TOTAL	LUAS LAHAN (m^2)
1	BABOO	7	13	20	11.165
2	TOFOI	7	13	20	7.700
3	TANAH MERAH	5	44	49	3.700
4	SENGGA	2	4	6	2.245
5	ONAR LAMA		10	10	6.702
6	ONAR BARU		9	9	10.000
	TOTAL	21	93	114	41.512

Sumber : Data yang diolah.

Adapun kegiatan usaha yang yang dilaksanakan oleh UMKM yang kaitannya dengan lembaga koperasi/ KUB dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 4.8 Kegiatan Usaha UMKM

LOKASI	KEGIATAN USAHA
Distrik Bintuni Nama Koperasi : Koperasi Bintuni Mandiri Ketua Koperasi : Kris Mailoa (Merangkap sebagai Kepala Bidang Koperasi Kab. Teluk Bintuni	➢ Koperasi menjual sayuran dan buah produksi anggota koperasi kepada PT Indocater secara rutin 3x seminggu kepada BP melalui PT Indocater ➢ Pengiriman semua komoditi dilakukan sendiri, yaitu menggunakan media transportasi boat yang disewa sebesar Rp 5 juta dan dikirim ke TMB,namun dalam proses pengiriman barang masih terdapat banyak pungutan ➢ Diperkirakan koperasi mendapat keuntungan yang besar, namun tidak ada pencatatan yang mendukung. ➢ Pengurus s angat mendukung perluasan Train 3 dan Train 4, sebab akan

	meningkatkan permintaan dari BP melalui PT Indocater sehingga pada gilirannya akan meningkatkan daya serap produksi anggota
Distrik Babo Nama Koperasi : Matambay Siri Berdiri :10 Juli 2010 Jumlah Anggota : 68 Orang	➢ Koperasi menjual kepiting produksi anggota koperasi kepada PT Indocater ➢ Jumlah order kepiting dari PT. Indocater bervariasi tergantung kepada menu yang akan dihidangkan oleh PT. Indocater, jumlah order untuk minggu ke 1 dan 3 jumlahnya 150 ekor dan minggu ke 2 dan 4 jumlahnya 400 ekor. Total order kepiting per bulan adalah: 1.100 ekor. ➢ Pembayaran disepakati dalam kontrak kerja adalah 21 hari,namun pada kenyataannya PT Indocater rmelakukan pembayaran kepada koperasi dalam jangka waktu 30 hari sampai 3 bulan,dimana hal ini sangat memberatkan pihak koperasi. ➢ Koperasi mengharapkan adanya kenaikan jumlah order kepiting dari Indocater karena hasil tangkapan kepiting mengalami peningkatan.Kelebihan hasil tangkapan tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga lebih baik dari harga pembelian PT Indocater ➢ Harga yang ditetapkan PT Indocater pada saat ini adalah Rp 19.000 /ekor untuk ukuran 700 gram,sedangkan harga beli dari pihak lain adalah Rp 22.000 – Rp 25.000/ekor untuk ukuran yang sama ➢ Namun walaupun harga beli PT Indocater lebih rendah dari harga pasar, koperasi masih memprioritaskan penjualan kepada PT Indocater, dengan alasan : (1) Adanya kepastian pasar dan kontunuitas pemesanan (2) PT Indocater dipandang sebagai representative BP, dimana koperasi merasa telah dibantu oleh BP berupa pemberian modal awal,pendampingan dan membangun kantor koperasi. ➢ Untuk meningkatkan jumlah tangkapan kepiting,koperasi telah mengajukan bantuan modal kepada BP sebesar Rp 50.000.000 untuk modal usaha dan Rp

	150.000.000 untuk keperluan investasi mesin dan perahu,namun sampai saat ini belum mendapat respons dari BP ➢ Upaya lain dari pengurus koperasi dalam mendapatkan tambahaan modal adalah bahwa pada saat ini koperasi sedang mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp 150.000.000 kepada bank BRI yang ada di Babo dengan agunan sertifikat tanah dan rumah ketua pengurus
Distrik Weriagar Nama Lembaga : KUB WERIAGAR Jumlah Anggota :40 Orang Tahun Berdiri : 2011 Bidang Usaha : Udang Nama Ketua : Lukman Muchtar .	➢ Hasil produk utama dari anggota koperasi adalah udang, pengumpulan udang dilaksanakan setiap hari Senin dengan harga beli dari nelayan sebesar Rp 40.000/ kg dan dijual ke Indocater sebesar Rp 60.000/kg ➢ Rata-rata permintaan dari PT Indocater sebesar 200 Kg/ minggu ➢ Jika ada kekurangan stock maka diambil dari Margarina dan jika ada kelebihan stock maka dititipkan ke KUB Weriagar sebab memiliki freezer namun membutuhkan bahan bakar yang mahal. Solar mencapai Rp 13.000/liter. Kebanyak nelayan anggota WUB menjual ke pasaran dengan harga murah sebesar Rp 20.000/ Kg ➢ Ketua WUB selalu menalangi pembayaran kepada Nelayan secara cash, sementara pembayaran dari PT Indocater biasanya selama satu minggu ke depan
Kampung Tanah Merah Nama Koperasi : KSU Mayri Tanah Merah Tahun Berdiri : Maret 2005 (Badan Hukum Kop) Ketua Pengurus : Thomas Jumlah Anggota : 70 Orang petani Jumlah Kel Tani : 4 Kelompok Tani Iuran pokok dan iuran wajib dari anggota belum dilakukan	➢ Hasil produk utama ialah produk-produk pertanian meliputi 31 jenis komoditi ➢ Setiap anggota petani memperoleh lahan untuk ditanami sayuran sebesar 18 X 18 meter ➢ Penimbangan dilakukan satu inggu satu kali di lokasi penimbangan (depan gedung LARAP) ➢ Semua produk ditampung oleh PT Indocater. ➢ Apabila kekurangan jumlah pesanan, maka pngurus koperasi akan mengambil dari petani di Kelapa Dua (Tofoi) ➢ Harga jual ke Indocater sangat baik, dibandingkan apabila dijual ke pasar

	umum. Hambatan umum ialah pupuk, bibit dan alat-alat pertanian
Kampung Saengga Nama Lembaga : UNOPERTA (Unit Otonom Perempuan Tani) Jumlah Anggota : 23 Orang Bidang Usaha : Produksi sayuran Nama Ketua : Mama Sarah	➢ Penjualan sayuran hasil produksi anggota Unoperta pernah berjalan lancar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011,namun penjualannya melalui koperasi Mayri di Kampung Tanah Merah Baru ➢ Keinginan untuk dapat bekerja sama secara langsung dengan PT Indocater sudah diupayakan dengan mendirikan koperasi Unoperta yang sudah setahun ini memiliki Badan Hukum,namun hingga saat ini Koperasi Unoperta belum mendapat kepercayaan dari PT Indocater ➢ Transformasi mata pencahaarian dari budaya nelayan menjadi budaya bertani belum berjalan dengan baik, sedangkan untuk menjadi nelayan kembali kondisinya sudah berubah karena areal tempat nelayan mencari ikan sudah menjadi areal yang tertutup bagi masyarakat, sehingga kalau masyarakat ingin menjadi nelayan lagi harus mencari areal tangkapan yang lebih jauh sehingga memerlukan modal yang lebih besar untuk perahu maupun bahan bakarnya. ➢ Terdapat program BP dalam membangun usaha bersama di Distrik Saengga, yaitu mendirikan usaha bengkel perbaikan motor tempel,ketingting,genset,mesin diesel, sepeda motor dan tambal ban. ➢ Belum tumbuhnya kepercayaan diri akan usaha bersama ini, berkaitan dengan tenaga mekanik yang trampil, kelancaran tersedianya spare part dan potensi pasar yang kurang memadai
Kampung Tofoi Nama Koperasi : KSU Imuri Jumlah Anggota : 38 orang Ketua Koperasi : Ibu kepala Desa Sekretaris : Mama Regina Kondisi Keuangan : Omzet penjualan per 5-04-2013 Rp 212.618.751 Simpanan pokok dan wajib Rp	➢ Produk utama anggota koperasi adalah sayur-sayuran ➢ Dalam menjalankan usahanya koperasi telah mendapat manfaat dari keberadaan BP antara lain ➢ Modal awal sebesar Rp 40.000.000 dari dana PBM yang digunakan untuk membeli alat-alat pertanian dan dukungan pemberian bibit pada awal memulai usaha

9.571.300 Cadangan Rp 120.185.000 Kas Rp 21.089.000	tani ➢ Telah dilakukan pelatihan bududaya pertanian, pelatihan pembuatan pupuk dan obat-obatan organic ➢ Jaminan penjualan ke PT Indocater dengan harga jual lebih besar dari harga pasar ➢ Untuk meningkatkan pendapatan anggota maka diharapkan PT Indocater dapat meningkatkan jumlah order sayuran dari KSU Imuri,saat ini rata-rata pesanan dari PT Indocater adalah 3,6 ton/bulan, sehingga diharapkan dengan bertambahnya jumlah pesanan maka akan memotivasi anggota untuk lebih meningkatkan produksi sayurannya dan koperasi juga dapat menambah jumlah anggotanya yang selama ini ada keengganan dari pengurus dan anggota untuk menambah anggota baru.

Sumber : Data yang diolah.

Pelaksanaan kegiatan usaha ini erat kaitannya dengan aktivitas *community development*, yang merupakan suatu upaya yang dapat menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung pengembangan UMKM di Teluk Bintuni. Untuk itu, pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat, baik dalam bidang petanian, perikanan maupun usaha kecil dan rumah tangga yang merupakan bagian *local economic development (LED)* yang diharapkan dapat berjalan secara serempak. Untuk mendukung pengembangan *community development*, diperlukan pendekatan lain untuk menjangkau masyarakat pedalaman maupun usaha mikro dan rumah tangga di wilayah tersebut, terutama dalam hal pembiayaan usaha khususnya skim kredit mikro.

Strategi utama dalam pengembangan keuangan mikro berbasis komunitas, pada dasarnya untuk memfasilitasi pembentukan maupun pengembangan kelompok swadaya masyarakat di setiap desa. Aktivitas ini pun memberdayakan kelompok yang telah ada sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat dan yang juga dapat berperan sebagai kelompok

simpan pinjam. Kelompok swadaya masyarakat tersebut dapat difasilitasi agar dapat menjadi *group lending* yang menjadi pintu dalam aktifitas simpan pinjam antara kelompok dengan lembaga keuangan mikro formal yang ada sehingga memudahkan dan mengurang biaya bank maupun lembaga keuangan mikro dalam pengelolan kredit tehadap. Selain itu, *group lending* yang ada perlu didampingi dan diperkuat kapasitasnya agar *bankable*.

4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat

Partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap keterkaitan di antara *stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat,yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisitaif pembangunan. Maka,pembangunan yang partisipatif *(participatory development)* adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Secara harfiah, partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertanya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Partisipasi masyarakat diperlukan karena program yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat, sehingga masyarakat harus terlibat dalam program pembangunan. Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil pogram pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan pencapaian sasaran yang di inginkan.Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta

tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi.

Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain,

a. Partisipasi dengan pemikiran (Psichological Partisipation)
b. Partisipasi dengan tenaga (Physical Partisipation)
c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif Partisipation)
d. Partisipasi dengan keahlian (With Skill Partisipation)
e. Partisipasi dengan barang (Material Partisipation)
f. Partisipasi dengan uang (Money partisipation)
g. Partisipasi dengan Jasa (Service Partisipation)
h. Bentuk Konsultasi
i. Bentuk sumbangan spontan berupa Barang / Jasa
j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat berdikari
k. Bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja
l. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela
m. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan / Cita-cita
n. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
o. dll

Adapun partisipasi masyarakat dan anggota koperasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Partisipasi Masyarakat

LOKASI	PARTISIPASI MASYARAKAT
Distrik Bintuni	➢ Partisipasi masyarakat cukup besar namun hampir semua produk yang dihasilkan didominasi oleh penduduk Suku Nusantara. ➢ Kecerdikan pengurus memungkinkan penerimaan barang bisa diperoleh dari mana saja, bahkan dari Manokwari sekalipun yang dikemudian ditampung dan dijual ke PT Indocater
Distrik Babo	➢ Pelaku usaha masih didominasi oleh warga Suku Nusantara dan sebagaian kecil OAP. Potensi kegiatan ekonomi di distrik ini diperkirakan akan mengalami peningkatan karena sudah beroperasinya lapangan terbang baik untuk kepentingan BP maupun masyarakat umum ➢ Program penciptaan usaha kecil selain bidang pertanian, pihak BP telah berupaya memberikan pelatihan-pelatihan seperti pembuatan kue, menjahit, pembuatan kerupuk dan memasak
Distrik Weriagar	➢ Semua nelayan yang menjadi anggota WUB Weriagar ialah OAP ➢ Mereka sangat mendukung perluasan Train 3 dan Train 4, sebab dalam pandangan mereka akan lebih meningkatkan penjualan udang dari hasil tangkapan nelayan.
Kampung Tanah Merah	➢ Semua petani yang terlibat di koperasi didominasi oleh OAP dan sebagian kecil Suku Nusantara. ➢ Untuk penjualan hasil pertanian, para petani memiliki ketergantungan yang tinggi kepada koperasi
Kampung Saengga	➢ Partisipasi masyarakat khususnya OAP dirasakan kurang keterlibatannya, sebab dengan adanya transformasi mata pencaharian dari budaya nelayan menjadi budaya bertani belum berjalan dengan baik dan membutihkan waktu cukup lama. ➢ Adanya hambatan berupa modal yang lebih besar untuk perahu maupun bahan

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

	bakarnya, yang juga menyebabkan partisipasi menjadi rendah
Kampung Tofoi	➢ Partisipasi masyarakat sangat baik dalam perkembangan koperasi, baik untuk suku OAP maupun suku Nusantara. ➢ Keterlibatan dalam pegambilan keputusan koperasi sangat demokratis, sebab figur pengurus demikian dipercaya oleh masyarakat.

Sumber : Data yang Diolah

4.4. Peran Badan Usaha Lainnya

4.4.1. Gapensi

Kehadiran Proyek Tangguh tidak dirasakan secara langsung oleh pelaku UKM baik yang tergabung dalam usaha konstruksi maupun usaha pengadaan barang lainnya, dari 300 anggota yang tergabung dalam organisasi Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) Teluk Bintuni belum satu perusahaan pun yang mendapat kepercayaan dari BP dikarenakan persyaratan yang sangat ketat.

Para pengusaha menyadari akan kekurangan yang mereka miliki, oleh karena itu harapannya adalah jika dipercaya sebagai Sub Kontraktorsudah cukup memuaskan mereka, sampai saat ini mereka merasa hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Sebagian anggota sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan BP dalam rangka mensosialisasikan hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan tender,namun pengusaha masih merasakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang relatif mempunyai standar yang tinggi

4.4.2. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah (Perusda) yang ada di Distrik Bintuni ialah Perusda Bintuni Tangguh Utama. Pendirian Perusda ini dilaksanakan dengan besaran saham sebesar 51% dimiliki oleh Pemda dan sisanya dimiliki oleh

swasta. Perusda ini ditujukan untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah, dan dalam pelaksanaannya sebagian besar pekerjaannya dilakukan oleh pihak ke tiga. Adapun pekerjaan proyek lainnya ialah proyek non pemerintah (misalnya proyek-proyek Genting Oil dan pihak lainnya). Hal ini tentu saja belum sesuai dengan tujuan dari didirikannya Perusda, yang intinya ialah harus dapat meberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Teluk Bintuni.

Sampai saat ini pihak Perusda belum berkaitan dengan proyek-proyek BP Indonesia dan belum terlihat adanya keterkaitan Perusda dengan KUKM di wilayah Teluk Bintuni.

4.5. Peran Pemrintah

Dukungan dari pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni masih belum optimal dengan alasan sebagai kabupaten yang baru dibentuk, maka pembentukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Tupoksi-nya masih mempelajari dan mencari formula yang sesuai dengan dinamika masyarakat

Dinas terkait dalam pengembangan KUMKM masih membutuhkan keselaraan kerja dalam menciptakan padu serasi pemberdayaan KUMKM. Hal ini menjadi penting, mengingat pemberdayaan KUMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. Khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi

(1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi.

(2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.

(3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM)

(4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

BAB V
PENDEKATAN-PENDEKATAN PENGEMBANGAN MICRO ENTERPRISE DAN VOCATIONAL UNTUK OPERASI JANGKA PANJANG THE TANGGUH LNG

Terdapat tiga alternatif dalam pendekatan pengembangan micro enterprise dan vocational untuk operasi jangka panjang pada The Tangguh LPG, yaitu :

a. Pendekatan closed camp
b. Pendekatan Open Camp
c. Pendekatan Modified

Masing-masing alternatif memerlukan analisis SWOT untuk mengetahui risiko yang dihadapi dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kemudian hari.

5.1 Strategi Pengembangan UMKM Melalui Analisis SWOT Untuk Pendekatan *Closed Camp*

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi dibangun berdasarkan masalah yang dihadapi dan sasaran yang akan dicapai. Untuk merumuskan atau merancang strategi pengembangan UMKM, maka perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang salah satunya adalah dengan menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), sebagai berikut :

Alternatif 1 : Pendekatan "Close Camp"

Yaitu kondisi seperti saat ini dengan ditambahkan kegiatan produksi, di mana kondisinya sebagai berikut:

1) Camp/pagar tertutup,.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

2) Status lajang (tidak membawa keluarga; tinggal di dalam fasilitas BP dan terpagar)
3) Interaksi yang terbatas antara karyawan/ kontraktor dengan masyarakat desa-desa sekitar
4) Penerimaan tenaga kerja (rekrutmen) dan pembayaran gaji di pusat pertumbuhan yang ada (Sorong, Manokwari, Fak-fak)
5) Pengadaan barang dan jasa pendukung dari pusat pertumbuhan yang ada (dan adanya mentoring bagi usaha lokal untuk mendukung tercapainya konten lokal)
6) Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada
7) Pengelolaan dana bagi hasil (revenue management) didukung oleh BP agar terfasilitasi pembangunan yang tepat (sesuai konteks rencana tata ruang dsb).

Pada kondisi saat ini, pendekatan yang dilakukan adalah adanya hubungan langsung antara local firm dengan BP Indonesia bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan. Sementara UMKM belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga untuk produk-produk yang berkualitas dikoordinasikan melalui stocking point. Pada saat ini Livelihood Department sudah mengembangkan berbagai program pertanian di DAV's, mengembangkan pasar lokal, pendirian stocking point dan outlet, mendirikan bisnis alternatif yang berhubungan dengan kepentingan BP seperti pelatihan dan pendirian bengkel sepeda, mengembangkan kapasitas dan mengembangkan lokal firm sehingga dapat memenuhi persyaratan BP Indonesia. Adapun analisis SWOT untuk pendekatan Closed Camp dapat dilihat dalam tabel sebagai beikut,

Tabel 5.1. Analisis SWOT Pendekatan Closed Camp

NO	PENDEKATAN	SWOT	
A.	**PENDEKATAN CLOSED CAMP** 1. Camp/pagar tertutup,.	**KEKUATAN**	**KELEMAHAN**
		1) Adanya alokasi sumber daya yang memadai 2) Adanya dukungan pelatihan yang	1) Masih terbatasnya kemampuan dan kompetensi UMKM 2) Kualitas SDM yang

	2. Status lajang (tidak bawa keluarga; tinggal di dalam fasilitas BP terpagar) 3. Interaksi yang terbatas antara karyawan/kontraktor dengan masyarakat desa-desa sekitar 4. Penerimaan tenaga kerja (rekrutmen) dan pembayaran gaji di pusat pertumbuhan yang ada (Sorong, Manokwari, Fak2) 5. Pengadaan barang dan jasa pendukung dari pusat pertumbuhan yang ada (dan adanya mentoring bagi usaha lokal untuk mendukung tercapainya konten lokal) 6. Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada 7. Pengelolaan dana bagi hasil (Revenue management) didukung oleh BP agar terfasilitasi pembangunan yang tepat (sesuai konteks rencana tata ruang dsb)	dilakukan internal BP ataupun konsultan 3) Adanya pendampingan yang dilakukan internal BP ataupun konsultan 4) Adanya dukungan pendanaan 5) Adanya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan usaha 6) Memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai 7) Adanya kebijakan dan dukungan kepala daerah 8) Adanya dukungan distribusi dan pasar bagi produk yang dihasilkan	belum sesuai kebutuhan 3) Sebagian besar masih mengabaikan aspek kelengkapan aspek legal/perlengkapan perizinan 4) Pelaku bisnis/UMKM belum sepenuhnya memahami anatomy perusahaan oil dan gas 5) Kebijakan daerah yang cukup memberatkan (misalnya restribusi perizinan yang tinggi/ 4x lebih tinggi dari daerah lain 6) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara UMKM dan pihak-pihak yang berkepentingan 7) Lemahnya system data dan pelaporan 8) Belum adanya database dan sistem informasi yang memadai 9) Belum memiliki standar pelayanan minimal 10) Belum adanya keterpaduan artar UMKM dan lembaga pendukung 11) Sistem perencanaan teknis dan monev belum efektif 12) Kurangnya tenaga professional untuk mendukung kegiatan UMKM
		PELUANG	**ANCAMAN**
		1) Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah 2) Adanya program-program pelatihan bagi UMKM 3) Adanya dana khusus	1) Letak geografis wilayah yang tersebar dan sulit terjangkau 2) Infrastruktur yang belum memadai sehingga banyak wilayah terisolasi

	▪	pembangunan distrik dan kampong 4) Adanya investor yang berminat untuk berinvestasi di wilayah pedalaman 5) Berkembangnya system data base dan teknologi informasi 6) Adanya kerjasama antar UMKM atau dengan lembaga terkait 7) Adanya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan perindustrian dan UMKM	3) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur 4) Perlu biaya yang tinggi untuk transportasir dapat berbisnis di lingkungan BP yang tinggi 5) Biaya yang tinggi untuk penyediaan infrastuktur 6) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa 7) Regulasi yang mengharuskan laporan keuangan diaudit akuntan public sementara ketersediaan akuntan public belum ada di wilayah kerja pengusaha 8) Adanya ketergantungan UMKM kepada pendamping baik pendamping dari pihak BP maupun pendamping dari pihak konsultan 9) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa

Dari hasil analis lingkungan strategis tersebut, kemudian akan dianalisis ke dalam beberapa strategi umum yang akan dipergunakan untuk merumuskan faktor-faktor yang menentukan kunci keberhasilan pembangunan UMKM di Teluk Bintuni. Perumusan strategi dengan menggunakan methode SWOT pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu :

(1) strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+ O),

(2) strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

ancaman (S+T),

(3) strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W+O), dan

(4) strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T).

Ke empat strategi tersebut dijabarkan untuk pendekatan closed camp dan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut,

Tabel 5.2. Penjabaran Strategi Analisis SWOT Pendekatan Closed Camp

NO	PENDEKATAN	STRATEGI UMUM (ANALISIS SWOT)	
A.	PENDEKATAN CLOSED CAMP	**S+O**	**S+T**
		1) Penguatan dan Pengembangan Usaha 2) Penguatan dan Pengembangan SDM 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana UMKM 5) Peningkatan vocational 6) Pengembangan sistem database dan teknologi informasi; 7) Pengembangan kerjasama dengan investor 8) Pengembangan kerjasama antar wilayah; **9)** Pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan terpadu.	1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur terutama daerah terpencil 2) Penyediaan SDM yang kompeten 3) Mengembangkan teknologi dan sistem informatika; 4) 4.Pembinaan kepada UKM dan lembaga terkait 5) Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/investor; 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
		W+O	**W+T**
		1) Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh komponen stakeholders 2) Mengoptimalkan pemanfaatan system teknologi informasi 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi aparatur	1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi UKM melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat; 3) Peningkatan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana

		secara intensif dan komprehensif; 4) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.	**4)** Peningkatan dan mengefektifkan sistem perencanaan teknis, perijinan dan monitoring evaluasi;

5.2 Strategi Pengembangan UMKM Melalui Analisis SWOT Untuk Pendekatan *Open Camp*

Alternatif ke dua ini merupakan pendekatan "Open Camp"/ pendekatan "klasik",yang juga banyak dipakai oleh proyek-proyek migas dan pertambangan lainnya

Kondisi umum "Open Camp" :

a. Intervensi pihak BP relatif minimal
b. Tenaga kerja tinggal di luar site The Tangguh LNG
c. Penerimaan tenaga kerja dan pembayaran gaji di sekitar site
d. Jasa-jasa pendukung dikontrakkan secara lokal
e. Interaksi bebas antara tenaga kerja Tangguh dengan masyarakat desa-desa sekitar
f. Pengadaan barang dan jasa bebas relatif terbuka
g. Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada
h. Pengelolaan dana bagi hasil (revenue management) menurut peraturan yang berlaku, tanpa intervensi dari BP

<table>
<tr><th colspan="4">MASUKAN</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>PENDEKATAN</th><th colspan="2">SWOT</th></tr>
<tr><td rowspan="4">B.</td><td rowspan="4">PENDEKATAN OPEN CAMP
▪
1. Intervensi pihak BP relatif minimal
2. Tenaga kerja tinggal di luar site The Tangguh LNG
3. Penerimaan tenaga kerja dan pembayaran gaji di sekitar site
4. Jasa-jasa pendukung dikontrakkan secara lokal
5. Interaksi bebas antara tenaga kerja Tangguh dengan masyarakat desa-desa sekitar
6. Pengadaan barang dan jasa bebas relatif terbuka
7. Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada
8. Pengelolaan dana bagi hasil (revenue management) menurut peraturan yang berlaku, tanpa intervensi dari BP</td><td>KEKUATAN</td><td>KELEMAHAN</td></tr>
<tr><td>1) Adanya alokasi sumber daya yang lebih banyak
2) Adanya dukungan pelatihan yang dilakukan internal BP ataupun konsultan
3) Adanya pendampingan yang dilakukan internal BP ataupun konsultan
4) Pendaanaan relative akan lebih banyak
5) Adanya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan usaha yang lebih fleksibel
6) Memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai
7) Adanya kebijakan dan dukungan kepala daerah
8) Distribusi dan pasar bagi produk akan lebih terbuka</td><td>1) Kompetensi SDM relatif belum sesuai kebutuhan pasar relatif masih rendah
2) Skala ekonomi yang relative rendah
3) Perlunya kelengkapan perizinan yang lebih baik
4) Pelaku bisnis/UMKM belum sepenuhnya memahami anatomy perusahaan oil dan gas
5) Kebijakan daerah yang cukup memberatkan (restribusi perizinan yang tinggi/ 4x lebih tinggi dari daerah lain)
6) Koordinasi UMKM dengan pihak terkait</td></tr>
<tr><td>PELUANG</td><td>ANCAMAN</td></tr>
<tr><td>1) Adanya potensi bisnis yang lebih besar
2) Adanya program-program pelatihan bagi UMKM
3) Adanya dana khusus pembangunan distrik dan kampong
4) Investor lebih banyak masuk ke area proyek
5) Informasi lebih terbuka memudahkan untuk berkoordinasi
6) Adanya kerjasama antar UMKM atau dengan lembaga terkait
7) Adanya kebijakan yang lebih terbuka di bidang perdagangan perindustrian dan UMKM</td><td>1) Regulasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendukung
2) Kebijakan BP perlu penyesuaian
3) Sinkronisasi yang belum terpadu
4) Perlu biaya yang tinggi untuk transportasi yang tinggi
5) Biaya yang tinggi untuk penyediaan infrastuktur
6) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa
7) Regulasi yang mengharuskan laporan keuangan diaudit akuntan public sementara ketersediaan akuntan</td></tr>
</table>

	▪		public belum ada di wilayah kerja pengusaha 8) Adanya ketergantungan UMKM kepada pendamping baik pendamping dari pihak BP maupun pendamping dari pihak konsultan 9) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa tersebut:

Keempat strategi tersebut, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

NO	PENDEKATAN	STRATEGI UMUM (ANALISIS SWOT)	
A.	PENDEKATAN OPEN CAMP,	**S+O**	**S+T**
		1) Penguatan SDM dan Pengembangan Usaha melalui kegiatan vocasional 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan pembiayaan pihak terkait 3) Pengembangan sistem database dan teknologi informasi; 4) Koordinasi yang lebih intensif dengan stake holder 5) Pengembangan kerjasama antar wilayah;	1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan SDM yang kompeten 2) Penyediaan SDM yang kompeten 3) Mengembangkan teknologi dan sistem infoan UMKMrmatika; 4) Perlunya perubahan kebijakan BP yang lebih mengakomodasi kepentinting 5) Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/investor; 6) Kebijkan pemerintah yang dapat mendorong partisipasi masyaraka
		W+O	**W+T**
		1) Peningkatan optimalisasi sarana informasi agar seluruh kegiatan lebih terkoordinasi dengan stake holder 2) Peningkatan bantuan	1) Peningkatan kegiatan vocational dan mendorong partisipasi masyarakatkemampuan dan kompetensi UKM melalui pendidikan dan

		pembiayaan untuk UMKM agar tercapai skala usaha yang efisien	pelatihan 2) Efektifitas sistem perencanaan teknis, perijinan dan monitoring evaluasi;

Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas maka dapat dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap kondisi The Tangguh di masa yang akan datang,dalam kondisi ”terbuka” ialah baik Local Firm maupun UMKM dapat berhubungan bisnis secara langsung dengan pihak BP Indonesia dengan memperhatikan beberapa perubahan yang terkait regulasi, skala ekonomi, kelembagaan, kebijakan BP Indonesia, kebijakan pemerintah serta sinkronisasi kebijakan

5.3 Analisis SWOT Pengembangan UMKM Untuk Pendekatan “Modified” The Tangguh LNG Yang Dimodifikasi

Kondisi umum pendekatan The Tangguh LNG yang dimodifikasi :

a. Pendekatan 1 (lanjutan pendekatan Tangguh yang sekarang dengan ditambahkan kegiatan produksi), plus perubahan pada strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga Bintuni dan Babo terhitung sebagai pusat pertumbuhan
b. Keterpencilan Tangguh site tetap terjaga
c. Nilai-nilai sosial dan lingkungan tetap terjaga
d. Laju perubahan terarah
e. Penerimaan tenaga kerja, pembayaran gaji dan pengadaan jasa dan barang dilakukan jauh dari site, untuk mendukung model pengembangan dan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan
f. Kamp tertutup, status lajang
g. Interaksi (pergaulan) karyawan/kontraktor dengan masyarakat desa-desa sekitar diminimalkan

h. Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada

i. Pengelolaan dana bagi hasil (Revenue management) didukung oleh BP agar terfasilitasi pembangunan yang tepat (sesuai konteks rencana tata ruang dsb)

NO	PENDEKATAN	SWOT	
C.	**PENDEKATAN MODIFIED** ▪ j. Pendekatan 1 (lanjutan pendekatan Tangguh yang sekarang dengan ditambahkan kegiatan produksi), plus perubahan pada strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga Bintuni dan Babo terhitung sebagai pusat pertumbuhan k. Keterpencilan Tangguh site tetap terjaga l. Nilai-nilai sosial dan lingkungan tetap terjaga m. Laju perubahan terarah n. Penerimaan tenaga kerja, pembayaran gaji dan pengadaan jasa dan barang dilakukan jauh dari site, untuk mendukung model pengembangan dan	**KEKUATAN** 1) Adanya alokasi sumber daya yang lebih banyak terlibat 2) Kondisi keamanan yang tetap terjaga 3) Adanya dukungan pelatihan yang dilakukan internal BP Indonesia ataupun konsultan 4) Adanya pendampingan yang dilakukan internal BP Indonesia ataupun konsultan 5) Adanya pembiayaan untuk pegemangan UMKM 6) Adanya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan usaha 7) Memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai 8) Kebijakan dan dukungan kepala daerah	**KELEMAHAN** 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kompetensi UMKM 2) Kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan 3) Sebagian besar masih mengabaikan aspek kelengkapan aspek legal/perlengkapan perizinan 4) Pelaku bisnis/ UMKM belum sepenuhnya memahami anatomi perusahaan oil dan gas 5) Kebijakan daerah yang cukup memberatkan (restribusi perizinan yang tinggi/ 4x lebih tinggi dari daerah lain) 6) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara UMKM dan pihak-pihak yang berkepentingan 7) Belum memiliki standar pelayanan minimal 8) Belum adanya keterpaduan antar UMKM dengan lembaga pendukung 9) Sistem perencanaan teknis dan monitoring dan evaluasi belum efektif 10) Kurangnya tenga professional untuk mendukung kegiatan UMKM
		PELUANG	**ANCAMAN**
		1) Adanya potensi sumber	1) Letak geografis wilayah

	pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan o. Kamp tertutup, status lajang p. Interaksi (pergaulan) karyawan/kontraktor dengan masyarakat desa-desa sekitar diminimalkan q. Target-target komposisi tenaga kerja tetap ada r. Pengelolaan dana bagi hasil (Revenue management) didukung oleh BP agar terfasilitasi pembangunan yang tepat (sesuai konteks rencana tata ruang dsb)	daya yang lebih besar 2) Adanya program-program pelatihan bagi UMKM 3) Adanya dana khusus pembangunan distrik dan kampong 4) Adanya investor yang berminat untuk berinvestasi di wilayah pedalaman 5) Berkembangnya system data base dan teknologi informasi 6) Adanya kerjasama antar UMKM atau dengan lembaga terkait 7) Adanya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan perindustrian dan UMKM	yang tersebar dan sulit terjangkau 2) Infrastruktur yang belum memadai sehingga banyak wilayah terisolasi 3) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur 4) Perlu biaya yang tinggi untuk transportasir dapat berbisnis di lingkungan BP yang tinggi 5) Biaya yang tinggi untuk penyediaan infrastuktur 6) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa 7) Regulasi yang mengharuskan laporan keuangan diaudit akuntan public sementara ketersediaan akuntan public belum ada di wilayah kerja pengusaha 8) Adanya ketergantungan UMKM kepada pendamping baik pendamping dari pihak BP maupun pendamping dari pihak konsultan 9) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyediaan barang dan jasa

Dari hasil analis lingkungan strategis tersebut, kemudian akan dianalisis ke dalam beberapa strategi umum yang akan dipergunakan untuk merumuskan faktor-faktor yang menentukan kunci keberhasilan pembangunan UMKM di Teluk Bintuni. Selanjutnya ke empat strategi tersebut, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

NO	PENDEKATAN	STRATEGI UMUM (ANALISIS SWOT)	
A.	PENDEKATAN MODIFIED	**S+O**	**S+T**
		1) Penguatan kompetensi SDM dan pengembangan usaha 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana UMKM 4) Peningkatan jenis dan kuantitas vokasinal 5) Pengembangan sistem database dan teknologi informasi; 6) Pengembangan kerjasama dengan investor 7) Adanya pengawasan yang terpadu	1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur terutama daerah terpencil 2) Peningkatan kualitas SDM agar sikron dengan kebutuhan BP 3) Mengembangkan sistim informasi yang terintegrasi 4) Pembinaan lebih terarah kepada UKM dan lembaga terkait 5) Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/investor; 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
		W+O	**W+T**
		1) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi 2) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.	1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi UKM melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat; 3) Peningkatan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana 4) Peningkatan dan mengefektifkan sistem perencanaan teknis, perijinan dan monitoring evaluasi;

Bedasarkan analisa SWOT tersebut diatas maka dapat dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap kondisi The Tangguh di masa yang akan datang,yaitu meningkatkan kerjasama Local Firm dengan BP Indonesia, dengan melibatkan UMKM baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk berbisnis dengan BP. UMKM dapat pula membentuk koperasi agar mempunyai kekuatan dalam menembus persyaratan yang ditetapkan BP.Seperti halnya dengan kondisi"open camp" untuk mencapai terlaksananya pendekatan ini diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan dari pihak BP dan pemerintah,peningkatan skala ekonomi agar tercapai efisiensi,pembiayaan yang terpadu serta sinkronisasi kebijakan dari pihak-pihak yang terkait.

5.4 Analisis Dampak Keberadaan The Tangguh LNG Di Masa Kini dan Di Masa Yang Akan Datang

Memperhatikan TOR yang telah ditetapkan, maka untuk Tim Micro Enterprises & Vocational harus melakukan analisis dampak yang berkaitan dengan :

a. Mengkaji kebijakan program pelaku usaha UMKM saat ini dan yang akan datang
b. Mengkaji resiko potensial yang mungkin muncul bagi masyarakat, pemerintah dan BP
c. Mengkaji bisnis lokal yang potensial dikaitkan dengan pengembangan proyek tangguh
d. Lokasi bisnis,pengembangan pasar,kapasitas dan sumber daya bisnis yang potensial

Di dalam laporan interim ini, Tim Micro Enterprises & Vocational menyusun suatu tabel guna memudahkan dalam melakukan analisis dampak terhadap masing-masing variable kajian, sebagai berikut :

BAB VI
ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN TANGGUH DALAM PENGEMBANGAN KUMKM

6.1 Kebijakan dan Program Pelaku Usaha UMKM

Kebijaka pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam pengembangan usaha masyarakat dilaksanakan oleh DInas terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Prdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Secara khusus pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Adapun Dinas lainnya yang secara langsung memberdayakan UMKM ialah Dinas Pertanian.

Upaya yang telah dilakukan secara di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, terus menerus dan berkelanjutna sebaga upaya mensukseskan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Teluk Bintuni menuju Bintuni Baru. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Teluk Bintuni berusaha untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan, perindustrian dan KUMKM. Pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain berupa belum optimalnya pelayanan perijinan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, lemahnya kelembagaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya investasi berskala sedang dan besar, perlunya pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap usaha-usaha perdagangan, perindustrian dan KUMKM perlunya alokasi bantuan modal untuk keberdayaan masyarakat, belum

berkembangnya usaha-usaha industri mikro kecil dan menengah, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan, perindustrian, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah.

Pembangunan bidang KUMKM merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang tidak terlepas dari pendekatan dalam kerangka menjaga kesinambungan pembangunan kabupaten secara utuh, termasuk memperhatikan juga kesinambungan perencanaan pembangunan terhadap keterpaduan program dan kegiatannya yang dipadukan dengan program dan kegiatan dari provinsi maupun nasional. Di dalam penjabarannya, kebijakan pemerintah daerah dalam pegembangan KUMKM dituntu berupaya untuk menuntaskan dan menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari masih rendahnya kemandirian (keberdayaan masyarakat) serta rendahnya aspek produktifitas dan akses terhadap sumber daya produktif. Disamping itu pula, dalam rangka mengatasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan sarana prasarana dasar perdagangan seperti pasar tradisional maupun modern, unit-unit pertokoan, pengawasan dan pengendalian pasar barang dan harga barang, serta pengendalian ekspor dan impor skala daerah; penyediaan sarana dan prasarana industri seperti penyediaan kawasan industri, pemberian fasilitas industri bagi masyarakat yang berusaha di bidang industri, penyederhanaan sistem regulasi di bidang industri skala daerah, serta pembinaan usaha industri; penyediaan sarana dan prasarana koperasi, pembinaan koperasi serta pemberian bantuan modal kepada koperasi; pembinaan dan pengawasan kepada usaha-usaha UMKM serta pemberian bantuan modal usaha kecil; memperkuat kerjasama investasi dan penanaman modal; serta penyederhanaan regulasi investasi dan penanaman modal.

Berkaitan kebijakan KUMKM dan keberadaan Tangguh LNG, maka diperlukan suatu sinkronisasi kebijakan antara Pemkab Teluk Bintuni dengan BP Indonesia. Tuntutan yang besar dari pemerintah kabupaten terhadap BP Indonesia tidak diperkuat engan kesiapan sumberdaya manusia, infrastruktur, perencanaan program dan pelaksanaan program itu sendiri. Hal ini

mengakibatkan ke dua lembaga ini berjalan sendiri-sendiri dengan eksistensi BP Indonesia demikian mendominasi aktivitas positif pengembangan KUMKM di Kabupaten Teluk Bintuni.

Untuk itu perlu suatu sinkronisasi kebijakan antara BP Indonesia dengan Pemkab Teluk Bintuni , meliputi :

a. Analisis kebutuhan pembinaan
b. Perencanaan kegiatan
c. Pelaksanaan kegiatan
d. Sinkroniasi aktivitas antar stakeholders
e. Moitoring dan
f. Evaluasi

6.2. Resiko Potensial yang Mungkin Muncul Dengan Adanya Pengembangan Proyek Tangguh

Keterkaitan pengembangan KUMKM dengan kemungkinan munculnya resiko potensial, antara lain :

a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM meliputi :
- Semakin terbuka lapangan kerja
- Pasokan kebutuhan bahan baku semakin besar

b. Munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pengembangan Tangguh, apabila tidak diiringi dengan peningkatan permintaan produk masyarakat terutama hasil pertanian dan perikanan

c. Besarnya ketidak-keserasian antara program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah dan BP Indonesia

d. Kegiatan operasional BP Indonesia dengan aktivitas UMKM dihadapkan dengan varian resiko :
- Resiko rendah
- Resiko menegah
- Resiko tinggi

e. Rentang kendali pengawasan dapat diukur dengan tingkat efektifitas :
- rendah
- menengah

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en 103/119

- tinggi

f. *Span of control* (rentang kendali) rentang denagn tingkat efektifitas :

- rendah
- menengah
- tinggi

6.3. Bisnis Lokal yang Potensial

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Teluk Bintuni 2010 terjadi pertumbuhan pada periode waktu 2008-2010 untuk :

- Sektor primer yaitu pertanian, tambang dan galian rata-rata 4%
- Sektor sekunder yaitu industri pengolahan, listrik,air bersih dan bangunan/konstruksi rata-rata 469,2 %
- Sektor tertier yaitu bidang jasa-jasa rata-rata 11,6 %

Kenaikan pertumbuhan yang sangat menonjol adalah sektor sekunder sebagai dampak dari dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur di kawasan Teluk Bintuni sebagai kabupaten yang baru dibentuk dan adanya program CSR dari investor seperti LNG Tangguh yang ikut membangun sarana pendidikan, kesehatan dan keagamaan, begitupun sektor tertier mengalami peningkatan yang signifikan sebagai akibat meningkatnya transaksi jasa seperti perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa-jasa lainnya.Sedangkan sektor primer yang didominasi oleh bidang pertanian sebagai kontributor utama pada nilai PDRB Kabupaten Teluk Bintuni hanya mengalami kenaikanrata-rata 4 %.

Dilihat dari para pelaku ekonomi, termasuk KUMKM juga mengalami peningkatan, terlihat dari meningkatnya jumlah surat-surat perijinan seperti Surat Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian jika dihubungkan dengan keberadaaan Proyek LNG Tangguh dan pengembangan Train 3 dan 4 maka hingga saat ini walaupun kegiatan bidang kontruksi mengalami peningkatan yang sangat tinggi di Kabupaten Teluk

Bintuni belum dapat memanfaatkan jasa para pengusaha konstruksi oleh Proyek LNG Tangguh. Informasi dari Pengurus Gapensi Teluk Bintuni membuktikan bahwa dari ± 300 anggotanya belum pernah manangani pekerjaaan yang diberikan oleh Proyek LNG Tangguh. Syarat yang sangat ketat dengan alasan bahwa pekerjaan yang berada di kawasan Proyek LNG tangguh memerlukan tingkat presisi dan keamanan yang sangat tinggi menjadi hambatan bagi para pengusaha anggota Gapensi Teluk Bintuni.

Kesempatan usaha bagi pengusaha konstruksi, teknik dan jasa lainnya sebenarnya cukup tersedia dengan adanya Proyek LNG Tangguh yaitu pekerjaan yang tingkat resikonya rendah seperti perbaikan Air Condition, Laundry dan perbaikan mesin penunjang operasional, namun kesempatan-kesempatan usaha ini belum dapat direalisasikan . Diharapkan kedepan terdapat perubahan kebijakan dari pihak manajemen Proyek LNG tangguh, terutama dengan adanya penambahan Train 3 dan 4 dapat melibatkan dan memanfaatkan jasa yang dapat disediakan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun perlu juga dipersiapkan kesiapan para pelaku usaha Orang Asli Paua (OAP) secara teknis dan kelembagaannya jika perubahan kebijakan tersebut terjadi sehingga adanya kesempatan usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh para pengusaha OAP. Keberadaaan Proyek LNG Tangguh hingga saat ini baru dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM di bidang pertanian yang meliputi komoditi sayuran, buah-buahan, ikan, udang dan kepiting.Permintaan terhadap komoditas tersebut dilakukan oleh PT. Indocater sebagai mitra Proyek LNG Tangguh dalam menyediakan makanan bagi pekerja yang berada di kawasan Proyek LNG Tangguh. PT. Indocater mensyaratkan pasokan sayuran, buah-buahan dan ikan tersebut harus dikelola oleh Koperasi diantaranya adalah Koperasi Matambeysiridi Babo, Koperasi Imuri di Tafoi, Koperasi Mayeri di tanah Merah Baru, Koperasi Weriagar, Koperasi Bintuni Mandiri di Bintuni, Koperasi Kokanggo di Taroi dan Koperasi Enenem Jaya di Arguni dengan nilai omzet ± Rp 8.380.372.725/tahun.

Upaya mendirikan Koperasi sebagai wadah ekonomi bagi para petani dan nelayan merupakan langkah yang tepat, pendirian koperasi ini lebih

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

melalui pendekatan *"Top-down approach"* sehingga performance koperasi-koperasi tersebut cukup beragam dan munculnya berbagai masalah jika dilihat dari pengelolaan dan sifat organisasi koperasi yang sesungguhnya. Pembinaan terhadap koperasi-koperasi tersebut yang dilakukan oleh pihak LNG Tangguh maupun dari Dinas terakit di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintuni masih perlu ditingkatkan, terutama mengenai pengetahuan perkoperasian bagi anggota, pengurus dan pengawas ; manajemen usaha koperasi dan kewirausahaan koperasi. Dengan melihat performance koperasi yang bekerjasama dengan PT. Indocater maka diantara koperasi tersebut yang sudah menjalankan manajemen dengan baik dan para anggota merasakan manfaat berkoperasi adalah Koperasi Imuri di Tafoi.

Pasokan sayuran, buah-buahan, ikan, udang dan kepiting dari koperasi sebagai mitra PT. Indocater diperkitrakan baru dapat memenuhi satu per tujuh (1/7 atau sekitar 14%) dari kebutuhan total PT. Indocater, dengan melihat angka persentase tersebut berarti masih cukup besar potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh para petani dan nelayan yang tergabung dalam koperasi tersebut, begitu pula dengan adanya rencana pembangunan Train 3 dan 4 akan memberikan manfaat bagi petani dan nelayan yang tergabung dalam koperasi. Oleh karena itu pembenahan koperasi dan peningkatan teknik pertanian untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk harus segera dilaksanakan.

6.4. Lokasi Bisnis, Pengembangan Pasar, Kapasitas dan Sumber daya yang Potensial

Pelaku UMKM di Kabupaten Teluk Bintuni masih terpusat di lokasi Bintuni yaitu sebanyak 72 %, jumlah penduduk yang paling banyak dan infrastruktur yang lebih baik serta Bintuni sebagai Ibu kota kabupaten menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM. Selanjutnya jumlah pelaku UMKM yang cukup besar tersebut di lokasi Manimeri, Babo, Sumuri, Meyado, Dataran Beimes dan Tembuni.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, sarana dan lokasi maka selain Bintuni adalah Sumuri, Babo dan Manimeri memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan UMKM khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Di distrik Babo selain sebagai distrik yang sudah lama berdiri juga dengan adanya base camp Proyek LNG Tangguh dan dioperasionalkannya lapangan terbang untuk melayani kepentingan Proyek LNG Tangguh dan masyarakat umum akan menjadi distrik yang potensi perkembangannya cukup pesat. Sumberdaya perikanan khususnya kepiting produktivitas penangkapannya masih dapat ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya permintaan dari pasar non PT. Indocater, untuk itu harus sudah mulai dicoba produksi kepiting tidak hanya mengandalkan penangkapan tetapi dibudidayakan. Begitupun potensi dan sumberdaya udang tersedia di distrik Weriagar, produktivitas penangkapan udang masih sangat potensial untuk ditingkatkan selain harus mulai juga diujicobakan budidaya udang oleh masyarakat di Weriagar.

Potensi yang dapat dikembangkan di Distrik Sumuri, khususnya Tafoi adalah aneka macam sayuran, kerjasama yang baik selama ini anatara KSU Imuri dengan PT. Indocater merupakan modal yang kuat untuk meningkatkan produktivitas sayuaran dan peningkatan permintaan dari PT. Indocater. Kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola usaha pengadaan sayuran dan kemampuan keuangannya menjadi potensi untuk meningkatkan produksi dan penambahan anggota sehingga pada akhirnya masyarakat di sekitar Tofoi dan Sumuri pada umumnya akan lebih sejahtera. Untuk distrik-distrik lainnya sebagai penghasil sayuran dan ikan pada dasarnya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan.

Keberadaan investor dibidang hasil Hutan, Minyak dan Gas yaitu dengan hadirnya PT. Jayanti, Proyek LNG Tangguh, Genting Oil, Eni dan Petro Kimia dikawasan Teluk Bintuni merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Perusahaan-perusahaan tersebut harus memprioritaskan pemberian kesempatan kepada masyarakat tersebut sehingga mereka merasakan manfaat dengan hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut di tanah mereka.

Secara keseluruhan mengenai aspek dampak resiko yang mungkin muncul, dikaitkan dengan tiga pendekatan dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini. Berikut ini ialah tebel analisis dampak dan resiko dengan pendekatan *current (approach,*

Tabel 6.1. Tabel Analisis Dampak dan Resiko Micro Enterprises & Vocational Pendekatan *Current (Aproach)*

No.	Variabel	Current Approach
1.	Kebijakan Program UMKM	• Analisis kebutuhan pembinaan • Perencanaan kegiatan • Pelaksanaan kegiatan • Sinkroniasi aktivitas antar stakeholders • Moitoring dan • Evaluasi
2.	Resiko Potensial : d. Masya-rakat b. Pemerintah c. BP Indonesia	• Terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM antara lain : - Lapangan Kerja - Supply bahan baku • Ketidakpuasan masyarakat terhadap manfaat adanya proyek tangguh dikaitkan dengan kegiatan UMKM • Tidak adanya keserasian antara program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah dan BP • Kegiatan operasional BP dari eksistensi UMKM dengn varian tingkat resiko :: - Resiko rendah - Resiko menegah - Resiko tinggi • rentang kendali pengawasan pendek, dengan efektifitas : - rendah - menengah - tinggi • Tingkat efisiensi rentang kendali - rendah - menengah - tinggi
3.	Kajian Bisnis Lokal yang Potensial	jenis usaha yang potensial berkembang antara lain : - pangan (pertanian dan hasil tangkapan laut) - hasil hutan

No.	Variabel	Current Approach
		- bahan bangunan - industri - kerajinan - jasa
4	a. Lokasi bisnis,pengem-bangan pasar	• Jumlah titik lokasi produksi • Jumlah UMKM dan produksinya • Lokasi stock point • Jumlah transaksi UMKM di stock pont • Lokasi local firm • Jumlah transaksi denganlocal firm • Sumber modal • Jumlah modal UMKM
	b. Kapasitas, Sumber daya bisnis yang potensial,	• JumlahTenaga Kerja • Variasi produk yang dihasilkan UMKM • Jenis teknologi yang digunakan UMKM • Perkembangan profit/ ROI • Jenis pelatihan

Sumber : Data yang diolah

Adapun tabel analisis dampak dan resiko dengan pendekatan *current (approach)*, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2. Tabel Analisis Dampak dan Resiko Micro Enterprises & Vocational Pendekatan Classical Aproach

No.	Variabel	Classic Approach
1.	Kebijakan Program UMKM	• Program baru BP dalam pemberdayaan UMKM • Dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM • Besarnya market share yang dimanfaatkan UMKM • Penyesuaian persyaratan BP dalam mengakomodir produk UMKM
2.	Resiko Potensial : e. Masyarakat	• Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM dengan kategori : - Rendah - Sedang - Tinggi
	b. Pemerintah	• Tingkat ketidakserasian antara pemerintah dengan BP dengan kategori - Rendah - Menengah - Tinggi

No.	Variabel	Classic Approach
	c. BP Indonesia	• Peningkatan Terhadap gangguan operasi BP dengan tingkatan : - Rendah - Menengah - Tinggi • rentang kendali pengawasan lebih panjang, dengan efektifitas : - rendah - menegah - tinggi • efesiensi rentang kendali : - rendah - menengah - tinggi -
3.	Kajian Bisnis Lokal yang Potensial	• peningkatan jenis usaha dan kapasitas produksi • peningkatan kualitas produk • pembinaan dan dukungan BP, serta pemerintah • Penetapan produk unggulan • OVOP
4	a. Lokasi bisnis,pengem-bangan pasar	• Alternatif pengembangan lokasi produksi • Prediksi peningkatan jumlah UMKM dan produksinya • Alternatif pengembangan lokasi stock point • Prediksi jumlah transaksi di stock point • Lokasi peningkatan local firm • Prediksi jumlah local firm • Alternatif pasar selain pasar BP
	b. Kapasitas Sumber daya bisnis yang potensial,	• Masyarakat umum • Institusi

Sumber : Data yang Diolah

Tabel analisis dampak dan resiko dengan pendekatan *Mixed (approach),* dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3. Tabel Analisis Dampak dan Resiko Micro Enterprises & Vocational Pendekatan Mixed Aproach

No.	Variabel	Mixed Approach
1.	Kebijakan Program UMKM	• Pada dasarnya kajian untuk option mixed approach cenderung relatif sama dengan current approach, namun lebih fleksibel pada kebijakan yang memfasilitasi perubahan pada strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar proyek. • Analisis kebutuhan pembinaan • Perencanaan kegiatan • Pelaksanaan kegiatan • Sinkroniasi aktivitas antar stakeholders • Moitoring dan • Evaluasi
2.	Resiko Potensial : f. Masya-rakat b. Pemerintah c. BP Indonesia	• Terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM antara lain : - Lapangan Kerja - Supply bahan baku • Ketidakpuasan masyarakat terhadap manfaat adanya proyek tangguh dikaitkan dengan kegiatan UMKM • Tidak adanya keserasian antara program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah dan BP • Kegiatan operasional BP dari eksistensi UMKM dengn varian tingkat resiko :: - Resiko rendah - Resiko menegah - Resiko tinggi • rentang kendali pengawasan pendek, dengan efektifitas : - rendah - menengah - tinggi • Tingkat efisiensi rentang kendali - rendah - menengah - tinggi
3.	Kajian Bisnis Lokal yang Potensial	jenis usaha yang potensial berkembang antara lain : - pangan (pertanian dan hasil tangkapan laut)

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

No.	Variabel	Mixed Approach
		- hasil hutan - bahan bangunan - industri - kerajinan - jasa
4	c. Lokasi bisnis,pengem-bangan pasar	• Jumlah titik lokasi produksi • Jumlah UMKM dan produksinya • Lokasi stock point • Jumlah transaksi UMKM di stock pont • Lokasi local firm • Jumlah transaksi denganlocal firm • Sumber modal • Jumlah modal UMKM
	d. Kapasitas, Sumber daya bisnis yang potensial,	• JumlahTenaga Kerja • Variasi produk yang dihasilkan UMKM • Jenis teknologi yang digunakan UMKM • Perkembangan profit/ ROI • Jenis pelatihan

Sumber : Data yang Diolah

6.5. Program Vokasi Bagi UMKM

Untuk menentukan program vokasi yang diperlukan, maka terlebih dahulu harus diketahui tentang layanan produk apa yang bisa dilayani oleh masyarakat. Tentunya jenis produk yang dilaksanakan ialah layanan produk yang tidak beresiko terhadap kelangsungan aktivitas operasional BP dan mampu dikerjakan oleh masyarakat.

Setelah diketahui penyediaan layanan produk oleh masyarakat, maka selanjutnya ialah menginventarisir kebutuhan internal BP Indonesia. kemudian dilakukan link and match antara program-program teknis bagi UMKM agar mampu memperoleh akses ke BP Indonesia. Program-program vokasi ini masih akan terus dikembangkan dan dianalisis setelah memperoleh data faktual dari kegiatan lapangan yang diharapkan dapat diperoleh gambaran yang akurat mengenai supply dan demand dari pihak-pihak yang

berkepentingan. Beberapa aktivitas vokasi yang dapat dikembangkan antara lain :

Bimbingan teknis vokasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM ialah :

1. Permintaan dari pihak BP Indonesia (Customized)
2. Pengolahan diversifikasi pangan
3. Pembuatan bahan bangunan
4. Pengolahan industri pangan (Pertanian dan Hasil Tangkapan Laut)
5. Pengembangan industri kerajinan
6. Bimbingan teknis manajemen usaha
7. Bimbingan teknis pemasaran barang dan jasa
8. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan usaha
9. Bimbingan teknis kelebagaan dan pengelolaan koperasi

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Dari gambaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Pengusaha di Teluk Bintuni terdiri atas :
   1) Local Firm
   2) Micro, Small & Medium Enterprises (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ UMKM)
   3) Pengusaha lain yang mampu bertransaksi bertransaksi dengan BP Indonesia, tetapi tidak melakukannya dengan berbagai alasan.

b. Local Firm terdiri atas :
   1) Local firm berskala kecil dengan net equity <= Rp 5 M;
   2) Local firm berskala menengah dengan net equity Rp 5-10 M dan
   3) Local firm berskala besar dengan net equity >= 10 M

c. UMKM terdiri atas :
   1) Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta
   2) Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 M
   3) Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 M sampai Rp 50 M

d. Local Firm difasilitasi oleh BHBEP dan total transaksi yang telah dibukukan sejak tahun 2009 ialah sebesar 17 juta US$. Untuk UMKM difasilitasi oleh Livelihood Department dengan pembiayaan mencapai Rp 6 M/ tahun.

e. Aktivitas local firm difasilitasi oleh BHBEP dengan nilai transaksi sejak 2009 sebesar Rp 15 juta US$, sedangkan aktivitas di tingkatan pelaku

usaha UMKM dilakukan oleh Livelihood Department dengan nilai pembinaan sebesar Rp 6 Milyar per tahun. Jumlah pelaku usaha (local firm) yang terlibat transaksi dengan BP Indonesia ialah sebesar 10%. Terdapat 48 perusahaan dari 500 perusahaan yang bertransaksi dengan BP Indonesia. Dari 500 perusahaan terdapat 222 perusahaan indigenous people dan 92 perusahaan ditangani oleh perempuan. Sementara untuk UMKM diperkirakan 20% ditangani oleh Livelihood Department dan Bina Swadaya Konsultan.

f. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Teluk Bintuni dalam kurun lima tahun terakhir selalu di posisi pertumbuhan ekonomi 2 digit. Sektor yang pertumbuhannya 1 digit, yaitu sektor pertanian, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan meningkat dari tahun ke tahun secara stabil hanya sektor industri
g. Regulasi yang dilakukan oleh BP Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa memiliki standar yang ketat, yang menyebabkan jumlah keterlibatan pengusaha (local firm) dalam bertransaksi masih rendah. Untuk UMKM sampai saat ini belum dapat melakukan transaksi dengan BP Indonesia (PSCM).
h. Belum ada sinkronisasi antara kebijakan pemberdayaan UMKM baik dari BP Indonesia, Pemkab Bintuni dalam implementasi di tingkat lapangan, sehingga dikhawatirkan terjadi pemberdayaan yang sifatnya parsial yang menjurus ke arah ego sektoral dan berimplikasi pada sektor lainnya.
i. Rendahnya skala ekonomi ekonomi pelaku usaha UMKM sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar mampu menjadi Local Firm yang mampu bertransaksi dengan BP Indonesia.
j. Perlu adanya skim kredit yang cocok untuk UMKM untuk pengembangan usaha dan jaminan pembayaran dari lembaga keuangan atas bentuk pembayaran mundur yang dilakuakan oleh pihak ke tiga. Skim cessie dalam lembaga keuangan layak untuk dikedepankan, agar penerimaan uang dari PT Indocater dapat langsung cair saat barang diterima di stocking point.

k. Aktivitas usaha baik di UMKM maupun di IKM merupkan supply yang disediakan oleh masyarakat sementara permintaan dari BP Indonesia di job site perlu identifikasi guna menetukan kegiatan vokasi apa yang cocok untuk dilaksanakan. Beberapa aktivitas vokasi yang dapat dikembangkan ialah :

1) Permintaan dari pihak BP Indonesia (Customized)
2) Pengolahan diversifikasi pangan
3) Pembuatan bahan bangunan
4) Pengolahan industri pangan (Pertanian dan Hasil Tangkapan Laut)
5) Pengembangan industri kerajinan
6) Bimbingan teknis manajemen usaha
7) Bimbingan teknis pemasaran barang dan jasa
8) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan usaha
9) Bimbingan teknis kelebagaan dan pengelolaan koperasi

l. Adanya kegiatan BP Indonesia di Kabupaten Bintuni sebagai daerah pemekaran baru, telah menciptakan multiplier effect (efek pelipatgandaan) dalam kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, khususnya bagi KUMKM (pertanian dan nelayan), namun bagi local firm belum begitu besar

m. Hubungan mutualisme antara petani/ nelayan dengan koperasi atau KUB atau Unit Otonom dan PT Indocater terdapat dalam situasi saling membutuhkan dan menguntungkan, terlepas bahwa yang menikmati ialah didominasi oleh suku Nusantara.

n. Dukungan dari pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni masih belum optimal dengan alasan sebagai kabupaten yang baru dibentuk, maka pembentukan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan Tupoksi-nya masih mempelajari dan mencari formula yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

o. Dinas terkait dalam pengembangan KUMKM masih membutuhkan keselaraan kerja dan penguatan tupoksi dalam menciptakan padu serasi pemberdayaan KUMKM.

p. Eksistensi pelaku dan aktivitas KUMKM meliputi :

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

1) Pelaku UMKM yang memiliki kreatifitas, dapat memanfaatkan peluang usaha dengan adanya perubahan-perubahan akibat adanya pembangunan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni. Golongan utama yang menikmati ialah penduduk Suku Nusantara, sementara PAP masih terbatas pada usaha bidang pertanian.
2). Semua pengadaan barang untuk KUMKM hanya melalui koridor PT. Indocater sebagai perusahaan yang dipercaya oleh BP dalam menyediakan catering bagi karyawan BP yang berada di Proyek Tangguh
3). Ketergantungan KUMKM kepada PT. Indocater patut diantisipasi dalam kerangka model pasar monopoli, sehingga BP melalui PSCM mengharuskan membuat peraturan yang pada dasarnya untuk selalu melibatkan peran serta KUMKM, terutama dari ketegasan klausul kontrak dan dari sisi quota produk.
4). Peran Livelihood yang didukung BSK sudah sangat baik dalam membina UMKM, namun penguatan metode dan community needs perlu pendalaman. Khususnya penguatan kelembagan dan operasional usaha. Sementara untuk local firm berada dalam posisi stagnan, sehingga membutuhkan penanganan tersendiri.
5). Rencana perluasan Train 3 dan Train 4 memberikan stimulus baru baru pelaku usaha KUMKM, sebab besaran kapasitas produk yang dihasilkan, akan terserap lebih banyak oleh koperasi/ KUB melalui koridor PT Indocater

q. Untuk penguatan kelembagaan usaha maka diperlukan :
1) Pembenahan yang terpadu, antara lain badan hukum, personal yang terlibat, pencatatan administrasi usaha yang rapih dan penguatan prinsip transparansi serta akuntabilitas
2) Dibutuhkan suatu audit internal yang melibatkan BP Indonesia, agar kelembagaan yang ada memberikan manfat yang lebih bagi anggota petani dan nelayan serta tidak jatuh ke tangan perseorangan. Tanpa perbaikan, maka hal ini tidak akan memberikan dampak postif dalam perluasan Train 3 dan Train 4.

https://ikopin.turnitin.com/viewer/submissions/oid:27002:4440036/print?locale=en

3) BP Indonesia perlu merumukan pembentukan lembaga tersendiri yang secara khusus menangani aktivitas usaha masyarakat, yang dikelompokan kepada usaha rumah tangga/ individu/ perseorangan, usaha kelompok tanpa badan hukum, usaha kelompok berbadan hukum. Lembaga ini dapat dibentuk di bawah naungan Livelihood Department.

r. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukan bahwa :

1) Manfaat terbesar keberadaan BP Indonesia, dinikmati oleh pelaku UMKM dari Suku Nusantara.
2) Penguatan suku OAP membutuhkan kerjasama intergrasi, mulai dari lembaga adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan BP Indonesia serta perusahaan lainnya. Yang intinya memperbesar keterlibatan suku OAP dalam bidang ekonomi dan pembangunan wilayah guna meminimalisir kemungkinan konflik dan kecemburuan sosial

7.2. Rekomendasi

Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Teluk Bintuni harus diarahkan untuk mulai berkompetisi kompetisi dengan pelaku ekonomi lain dan mulai menyadari agar dengan siring berjalannya waktu, maka ketergantungan terhadap keberadaan BP Indonesia agar mulai dikurangi. Hal ini berkaitan dengan daya saing. Untuk itu direkomendasikan beberapa hal penting, antara lain :

1. Keunikan *(diffrentiation)* yaitu kemampuan UMKM memproduksi barang/jasa yang unik atau memiliki citra tersendiri yang berbeda dengan produk sejenis bagi kensumennya,
2. Biaya rendah *(Lower cost)* yaitu kemampuan UMKM memproduksi barang/jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang sejenis dan kualitas serta pelayanan di pasar yang sama.
3. Fokus keunikan (focus *diffrentiation)* yaitu kemampuan UMKM memproduksi barang/jasa yang unik atau memiliki citra tersendiri yang

berbeda dengan produk sejenis bagi konsumennya pada daerah pemasaran yang terbatas, dan

4. Fokus biaya rendah *(Lower cost)* yaitu kemampuan UKM memproduksi barang/jasa dengan harga yang lebih murah karena keunggulan komperatif dibandingkan dengan barang sejenis dan kualitas serta pelayanan di pasar yang khusus dan terbatas.

Beberapa rekomendasi yang dijabarkan dalam tindakan antara lain;

1. Pengembangan UMKM melalui penetrasi ke pasar tradisional sesuai dengan spesifikasi permintaan pasar
2. Melakukan diversifikasi usaha sesuai kebutuhan
3. Membangun jaringan/ integrasi bisnis horizontal yang didukung oleh pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan difasilitasi dalam tahap inisiasi oleh BP Indonesia
4. Memperbesar aktivitas bimbingan teknis yang diperlukan dengan aktivitas vokasi dan menyesuaikan dengan kemampuan SDM
5. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha
6. Pemanfaatan CSR *(Corporate Social Responsbility)* perusahaan swasta lain selain BP Indonesia secara maksimal
7. Penguatan kelembagaan baik di tingkat kelompok tani, klompok usaha bersama dan koperasi.